

SKRIPSI

**PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PEMBERDAYAAN
LAYANAN KESEHATAN MASYARAKAT DI KELURAHAN
LOMPOE KOTA PAREPARE (ANALISIS AL –
DHARURIYAH AL – KHAMSAH)**



OLEH :

**ANDI HUSNUL AWALIYAH
NIM: 18.2600.027**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2022

**PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PEMBERDAYAAN LAYANAN
KESEHATAN MASYARAKAT DI KELURAHAN LOMPOE KOTA
PAREPARE (ANALISIS AL – DHARURIYAH AL – KHAMSAH)**



OLEH :

ANDI HUSNUL AWALIYAH

18.2600.027

Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE**

2022

PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

Judul Skripsi : Peran Pemerintah Daerah Dalam Pemberdayaan
Layanan Kesehatan Masyarakat Di Kelurahan
Lompoe Kota Parepare (Analisis Al – Dharuriyah Al
- Khamseh)

Nama Mahasiswa : Andi Husnul Awaliyah

NIM : 18.2600.027

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

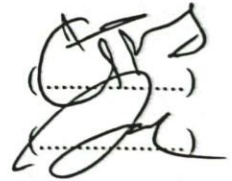
Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Dasar Penetapan Pembimbing : SK. Dekan FAKSHI IAIN Parepare
Nomor : 2001 TAHUN 2021

Disetujui Oleh :

Pembimbing Utama : Dr. Agus Muchsin, M.Ag
NIP : 197311242000031002

Pembimbing Pendamping : Dr. H. Syafaat Anugrah Pradana, S.H., M.H
NIP : 199305262019031008



Mengetahui:

Dekan,
Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam



Dr. Rahmawati, M.Ag.
NIP.197609012006042001

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Peran Pemerintah Daerah Dalam Pemberdayaan Layanan Kesehatan Masyarakat Di Kelurahan Lompoe Kota Parepare (Analisis Al – Dharuriyah AL- Khamsah)

Nama Mahasiswa : Andi Husnul Awaliyah

NIM : 18.2600.027

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Dasar Penetapan Pembimbing : SK. Dekan FAKSHI IAIN Parepare Nomor : 2001 TAHUN 2021

Tanggal Kelulusan : 19 Desember 2022

Disahkan Oleh Komisi Penguji :

Dr. Agus Muchsin, M.Ag	(Ketua)	(.....)
Dr. H. Syafaat Anugrah Pradana, S.H., M.H	(Sekretaris)	(.....)
Dr. H. Suarning, M.Ag	(Anggota)	(.....)
Dr. Aris, S.Ag., M.HI	(Anggota)	(.....)

Mengetahui:

Dekan,

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam



(Signature)
Dr. Rahmawati, M.Ag. *(Signature)*
NIP.197609012006042001

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamualaikum Wr. Wb.

Puji syukur kehadiran Allah swt yang telah melimpahkan segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PEMBERDAYAAN LAYANAN KESEHATAN MASYARAKAT DI KELURAHAN LOMPOE KOTA PAREPARE (ANALISIS AL – DHARURIYAH AL - KHAMSAH)”** sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar sarjana hukum pada Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam (FAKSHI) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare. Sholawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW yang mana segala tindakannya menjadi tauladan untuk kita semua.

Skripsi ini berisi hasil penelitian yang dilakukan untuk mengetahui peran pemerintah daerah dalam pemberdayaan layanan kesehatan masyarakat di kelurahan lompoe kota parepare. Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menyadari masih banyak kekurangan, sekiranya ada masukan dan kritiakan dari pembaca yang bersifat membangun, maka penulis akan menerimanya dengan senang hati.

Dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini banyak pihak yang telah membantu dan memberi dukungan serta motivasi. Oleh karena itu melalui kesempatan ini, penulis menyampaikan penghargaan yang setinggi – tingginya dan mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya terkhusus kepada kedua orang

tua, Ayahanda Selli Andi Ratte dan Ibunda Zaenab dan yang senantiasa memberi semangat dan dukungannya dalam kelancaran studi penulis. Berkat kekuatan doa luar biasa yang setiap saat beliau haturkan kepada penulis agar selalu mencapai kemudahan disegala urusan, diberi kesehatan dan perlindungan oleh Allah swt. Tak lupa didikan dan perjuangannya dalam membesarkan penulis, semoga Allah swt memberikan kebahagiaan yang tiada tara di dunia maupun di akhirat kelak.

Selama penyusunan skripsi ini penulis mengalami kesulitan dan hambatan, namun berkat partisipasi, bantuan, dukungan dan doa serta bimbingan dari berbagai pihak maka kesulitan dapat teratasi. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih yang mendalam kepada semua pihak atas segala bantuannya dalam penyusunan skripsi ini, terutama kepada bapak Dr. Agus Muchsin, M.Ag. selaku pembimbing I dan bapak Dr. H. Syafaat Anugrah Pradana, S.H., M.H. selaku pembimbing II yang telah sabar dan ikhlas meluangkan waktu, tenaga, dan fikiran dalam memberikan bimbingan, motivasi, dan saran – saran kepada penulis selama penyusunan skripsi.

Selain itu ucapan terima kasih dengan penuh rasa tulus dan hormat penulis haturkan kepada :

1. Bapak Dr. Hannani, M.Ag. selaku Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di IAIN Parepare.
2. Ibu Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam atas pengabdianya telah menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa.

3. Bapak dan ibu dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam yang telah meluangkan waktu mereka dalam mendidik penulis dengan tulus selama studi di IAIN Parepare.
4. Para staf yang ada di IAIN Parepare yang telah membantu dan melayani penulis dengan baik dalam pengurusan berbagai hal.
5. Bapak Lurah Kelurahan Lompoe Kota Parepare yang telah berkenan menerima dan membantu penulis untuk melakukan penelitian.
6. Ibu Rosdiana, S.E., selaku Kepala Pelayanan Umum dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Lompoe Kota Parepare yang telah memberikan arahan dan informasi mengenai data – data yang di perlukan penulis.
7. Teristimewa kepada kedua orang tua saya tercinta, dan juga adik saya yang senantiasa memberikan curahan kasih sayang, perhatian, semangat, motivasi dan doa kepada penulis untuk bisa menyelesaikan program studi ini.
8. Sepupu penulis, Nurhamisa Nurdin, Nurainun Nurdin, Dian Eka, Devi Dwi Wulandari, Amna Sapna Dian, Jihan Meilinda dan Emy Nurmeilawati, dan seluruh keluarga besar penulis tanpa terkecuali yang selalu menyemangati penulis, terima kasih atas waktu dan dukungannya.
9. Sahabat – sahabat penulis, Amalia Indah Pertiwi, Fitriani, Nurhummu Safitri, Utari Nur Persada, Dewi Masita, Mayupiana, Syahfira Salsabila, Fitrah Azizah, Mutiara Khaerunnisa, Susi Trisnawati, Andi Syahrul Jaya, Muh. Rezq Darmawan dan Muh. Yusuf Reski Paldi Nur yang telah memberikan semangat kepada penulis dan yang setia dari awal perkuliahan hingga akhir

perkuliahan serta berjuang bersama – sama dan memberikan dorongan kepada penulis dalam menyelesaikan studinya.

10. Teman – teman KPM (Kuliah Pengabdian Masyarakat) penulis khususnya teman posko yang selama kurang lebih 1 bulan menjalani pengabdian kepada masyarakat, bapak Kepala Desa Pekalobean, Ibu Posko dan seluruh masyarakat Pekalobean Kab. Enrekang.
11. Rekan – rekan mahasiswa S1 Hukum Tata Negara IAIN Parepare angkatan 2018, serta kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak sempat penulis sebut satu persatu.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan maka dari itu dengan segala kerendahan hati penulis senantiasa menerima saran dan kritikan dari berbagai pihak yang sifatnya membangun demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan semua pihak yang berkepentingan.

Parepare, Desember 2022

Penulis,

Andi Husnul Awaliyah
NIM. 18.2600.027

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Andi Husnul Awaliyah
Nim : 18.2600.027
Tempat, Tgl Lahir : Parepare, 2 Februari 2000
Program Studi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Judul Skripsi : Peran Pemerintah Daerah dalam Pemberdayaan Layanan Kesehatan Masyarakat di Kelurahan Lompoe Kota Parepare (Analisis Al – Dharuriyah Al – Khamsah)

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi ini dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, Desember 2022
Penulis,

Andi Husnul Awaliyah
NIM. 18.2600.027

ABSTRAK

Andi Husnul Awaliyah. *Peran Pemerintah Daerah dalam Pemberdayaan Layanan Kesehatan Masyarakat di Kelurahan Lompoe Kota Parepare (Analisis Al – Dharuriyah Al – Khamsah)*, (dibimbing oleh Agus Muchsin dan Syafaat Anugrah Pradana).

Penelitian ini membahas tentang Pemberdayaan Layanan Kesehatan Masyarakat di Kelurahan Lompoe Kota Parepare tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Peran Pemerintah Dalam Pemberdayaan Layanan Kesehatan Masyarakat di Kelurahan Lompoe Kota Parepare dalam analisis *Al – Dharuriyah Al – Khamsah* dan untuk mengetahui prinsip sukses dalam Pemberdayaan Layanan Kesehatan Di Kelurahan Lompoe Kota Parepare.

Penelitian ini dilaksanakan di Kota Parepare, khususnya di Kantor Kelurahan Lompoe Kota Parepare. Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, yaitu jenis penelitian yang berupaya untuk mendiskripsikan, mencatat, menganalisis dan menginterpretasikan fakta-fakta yang ditemukan melalui observasi, wawancara dan mempelajari dokumentasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peranan pemerintah daerah dalam pemberdayaan layanan kesehatan di Kelurahan Lompoe Kota Parepare sudah dapat dikatakan berjalan dengan baik. Hal itu dapat dilihat dari penyediaan pelayanan kesehatan dari pemerintah kelurahan kepada masyarakat Kelurahan Lompoe Kota Parepare. Analisis *Al – Dharuriyah Al – Khamsah* memuat beberapa hal tentang kesehatan yang merupakan salah satu faktor penting bagi kehidupan manusia karena dengan kondisi sehat manusia bisa beraktifitas dengan nyaman dan banyak berbuat kebaikan dengan memberi manfaat kepada sesama. Namun masih ada sedikit kendala seperti masih kurangnya sosialisasi masalah kesehatan kepada masyarakat dan juga partisipasi masyarakat. Pemerintah Kelurahan Lompoe Kota Parepare sudah cukup baik dengan menyediakan pemeriksaan kesehatan gratis untuk masyarakat Kelurahan Lompoe Kota Parepare.

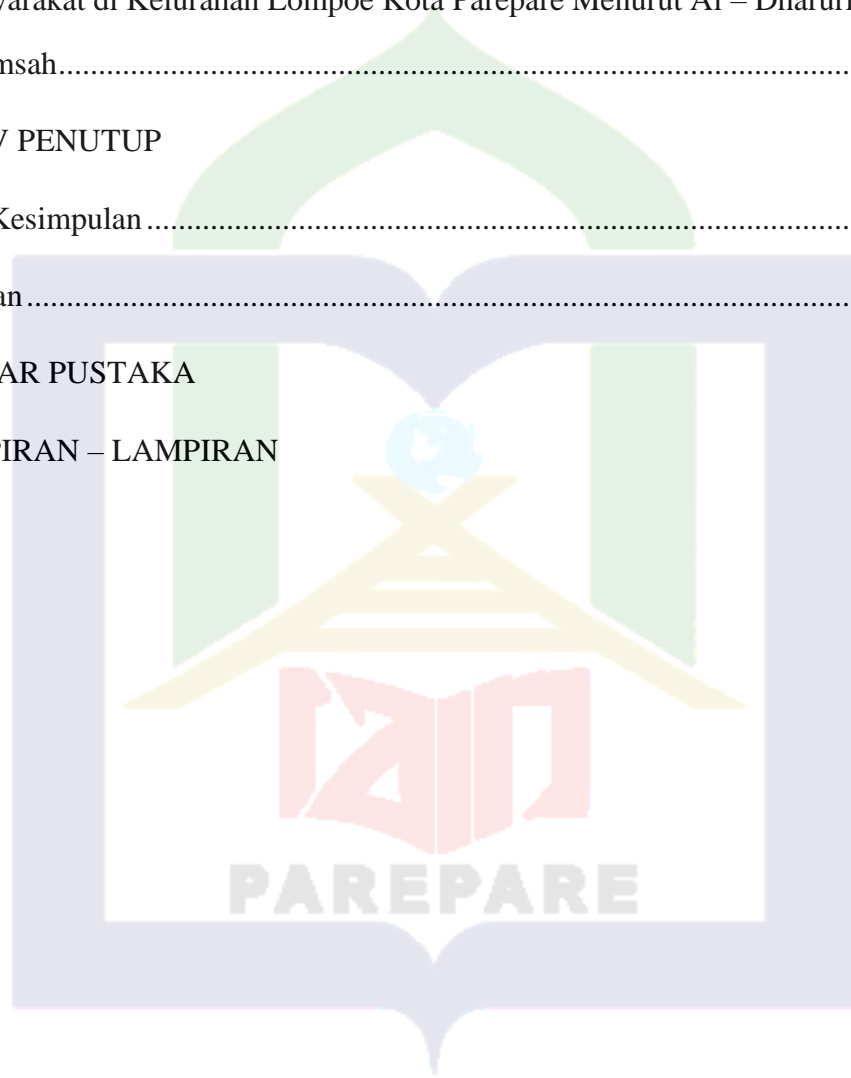
Kata Kunci : Pemberdayaan Masyarakat, Layanan Kesehatan, *Al – Dharuriyah Al – Khamsah*.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN KOMISI PENGUJI.....	iv
KATA PENGANTAR	v
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ix
ABSTRAK	x
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Kegunaan Penelitian.....	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Penelitian Relevan	11
B. Tinjauan Teori.....	12

1. Teori Peran	13
2. Teori Pemberdayaan.....	14
3. Al – Dharuriyah Al - Khamsah	15
C. Kerangka Konseptual.....	18
1. Konsep Pemberdayaan Masyarakat.....	18
2. Prinsip - Prinsip Pemberdayaan Masyarakat.....	27
3. Tujuan Pemberdayaan Masyarakat.....	33
4. Faktor – Faktor yang Berpengaruh Terhadap Proses Pemberdayaan Masyarakat.....	35
D. Kerangka Pikir	41
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	42
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	43
C. Fokus Penelitian.....	43
D. Jenis dan Sumber Data.....	43
E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data	46
F. Uji Keabsahan Data.....	49
G. Teknik Analisis Data.....	49
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	

A. Prinsip Sukses dalam Pemberdayaan Layanan Kesehatan Masyarakat di Kelurahan Lompoe Kota Parepare	53
B. Peranan Pemerintah Daerah dalam Pemberdayaan Layanan Kesehatan Masyarakat di Kelurahan Lompoe Kota Parepare Menurut Al – Dharuriyah Al - Khamsah.....	62
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	60
B. Saran.....	60
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN – LAMPIRAN	



DAFTAR GAMBAR

No. Gambar	Judul Gambar	Halaman
1	Bagan Kerangka Pikir	36



DAFTAR LAMPIRAN

No. Lampiran	Judul Lampiran	Halaman
1.	Permohonan Izin Penelitian	VII
2.	Rekomendasi Penelitian	VIII
3.	Pedoman Wawancara	IX
4.	Surat Telah Melaksanakan Penelitian	XI
5.	Surat Keterangan Wawancara	XII
6.	Dokumentasi	XV



TRANSLITERASI DAN SINGKATAN

A. Transliterasi Arab – Latin

1. Konsonan

Konsonan bahasa Arab yang dilambangkan dengan huruf dalam sistem tulisan Arab. Ada yang dikodekan dengan huruf, ada yang dikodekan dengan huruf dalam transliterasi ini, ada pula yang dikodekan dengan huruf dan huruf.

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tha	Th	te dan ha
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha

د	Dal	D	De
ذ	Dhal	Dh	de dan ha
ر	Ra	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Shad	ṣ	es (dengan titik dibawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik dibawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik dibawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik keatas

ع	Gain	G	ge
ف	Fa	F	ef
ق	Qof	Q	qi
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	el
م	Mim	M	em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

“Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (’)

b. Vokal

- 1) Vokal tunggal (*monoftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	Fathah	A	A
اِ	Kasrah	I	I
اُ	Dammah	U	U

- 2) Vokal rangkap (*diftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اِيّ	fathah dan ya	Ai	a dan i
اُوّ	fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : kaifa

حَوْلَ : haula

c. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
آ/أَـيَ	fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis diatas
إِـيَ	kasrah dan ya	Ī	i dan garis diatas
أُـو	dammah dan wau	Ū	u dan garis diatas

Contoh:

مَاتَ : māta

رَمَى : ramā

قِيلَ : qīla

يَمُوتُ : yamūtu

d. Ta Marbutah

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua:

- 1). *Ta marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah [t]

2). *Ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

“Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan *ha (h)*.

Contoh:

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ : *Rauḍah al-jannah* atau *Rauḍatul jannah*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *Al-madīnah al-fāḍilah* atau *Al-madīnatul fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *Al-hikmah*

e. *Syaddah (Tasydid)*

‘Syaddah’ atau ‘Tasydid’ yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ˀ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang dilambangkan dengan sebuah tanda syaddah. Contoh:

رَبَّنَا : *Rabbanā*

نَجَّيْنَا : *Najjainā*

الْحَقُّ : *Al-Haqq*

الْحَجُّ : *Al-Hajj*

نُعْمٌ : *Nu’ima*

عَدُوٌّ : 'Aduwwun

Jika 'huruf ع ' bertasydid diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (يِ), maka ia litransliterasi seperti huruf *maddah* (i).

Contoh:

عَرَبِيٌّ : 'Arabi (bukan 'Arabiyy atau 'Araby)

عَلِيٌّ : "Ali (bukan 'Alyy atau 'Aly)

f. Kata Sandang

Kata 'sandang' dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf لا (*alif lam ma'rifah*). Dengan pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasikan secara normal, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiyyah maupun huruf qamariyyah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan tanda hubung (-). Contoh:

Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (bukan *az-zalزالah*)

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

g. Hamzah

Aturan transliterasi karakter hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku untuk hamzah di tengah dan di akhir kata. Namun, jika hamzah berada di awal kata, hamzah tidak dikodekan karena ia adalah alif dalam bahasa Arab. Contoh:

تَأْمُرُونَ	:	<i>ta'murūna</i>
النَّوْءُ	:	<i>al-nau'</i>
شَيْءٌ	:	<i>syai'un</i>
أَمْرٌ	:	<i>umirtu</i>

h. Kata Arab yang lazim digunakan dalam bahasa Indonesia

Kata, istilah, atau frasa Arab yang ditranskripsi adalah kata, istilah, atau frasa yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim digunakan dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia tidak lagi ditulis dengan menggunakan metode transliterasi di atas. Misalnya Al Quran (Dar Qur'an), kata Sunnah.

Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fī ẓilāl al-qur'an

Al-sunnah qabl al-tadwin

Al-ibārat bi 'umum al-lafẓ lā bi khusus al-sabab

i. Lafẓ al-Jalalah (الله)

Kata "Allah" yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilahi* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ *Dīnullah*

بِاللَّهِ

billah

Adapun *ta marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafẓ al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ Hum fī rahmmatillāh

j. Huruf Kapital

Sistem penulisan bahasa Arab tidak menggunakan huruf kapital, tetapi huruf kapital digunakan dalam transkripsi ini sesuai dengan ‘Pedoman Ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan (EYD)’ yang berlaku saat ini. Huruf kapital digunakan, misalnya, untuk menuliskan huruf pertama kata benda (kata benda, nama tempat, bulan) dan huruf pertama pada awal kalimat. Jika kata benda didahului oleh kata sandang (al-), huruf pertama kata benda ditulis dengan huruf besar, bukan huruf pertama kata sandangnya. Huruf A dalam kata sandang ditulis dengan huruf besar (Al-) ketika muncul di awal kalimat. Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi’a linnāsi lalladhī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramadan al-ladhī unzila fih al-Qur’an

Nasir al-Din al-Tusī

Abū Nasr al-Farabi

Jika nama asli seseorang menggunakan Ibnu (anak dari) dan Abu (ayah dari) sebagai nama keluarga kedua, kedua nama keluarga tersebut harus dicantumkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau bibliografi. Contoh:

Abū al-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: *Ibnu Rusyd*, *Abū al-Walīd Muhammad* (bukan: *Rusyd*, *Abū al-Walid Muhammad Ibnu*)

Naşr Hamīd Abū Zaid, ditulis menjadi Abū Zaid, Naşr Hamīd (bukan: Zaid, Naşr Hamīd Abū)

B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang di bakukan yakni:

swt	=	<i>subḥānāhu wa ta'āla</i>
saw	=	<i>ṣallallāhu 'alaihi wa sallam</i>
a.s	=	<i>'alaihi al-sallām</i>
H	=	Hijriah
M	=	Masehi
SM	=	Sebelum Masehi
l.	=	Lahir Tahun
w.	=	Wafat Tahun
QS../...: 4	=	QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrahim/..., ayat 4
HR	=	Hadis Riwayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab

ص	=	صفحة
دم	=	بدون مكان
صلعم	=	صلى الله عليه وسلم
ط	=	طبعة
دن	=	بدون ناشر
الخ	=	إلى آخرها/إلى آخره

ج جزء =

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi memerlukan penjelasan tentang panjangnya. Sebagai contoh:

ed. : Editor (Editor [kata editor] jika ada lebih dari satu editor). Kata "editor" dalam bahasa Indonesia mengacu pada satu atau lebih editor, sehingga dapat disingkat menjadi ed. (tanpa huruf S).

et al. : "dll." atau "dan lain-lain" (kependekan dari Etalia). Ditulis dengan huruf miring. Sebagai alternatif, singkatan dkk. ("dan kawan-kawan") digunakan dan ditulis dengan huruf biasa/tegak.

Cet. : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.

Terj : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga untuk penulisan karta terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahnya

Vol. : Volume. Digunakan untuk menunjukkan nomor volume buku atau ensiklopedia dalam bahasa Inggris. Juz biasanya digunakan untuk buku-buku berbahasa Arab.

No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Peran pemerintah Kelurahan dalam pemberdayaan masyarakat adalah ikut serta dalam Pengelolaan dalam layanan kesehatan masyarakat dan layanan pendidikan dan budaya di wilayah tersebut. Oleh karenanya itu, perlu diketahui peran masing-masing instansi dalam melakukan kegiatan penguatan masyarakat permukiman perkotaan. Secara umum, pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk memulihkan dan memperkuat keberdayaan masyarakat agar mampu bertindak sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai komunitas manusia dan dalam melaksanakan hak-hak dan tanggung jawabnya sebagai warga negara.¹

Pemberdayaan masyarakat membutuhkan proses yang mendorong masyarakat untuk berpikir kritis tentang hak dan tanggung jawab mereka. Pemberdayaan juga membutuhkan proses pengembangan kepemimpinan lokal yang setara dan adil bagi masyarakat. Proses memberdayakan yang lemah dan melemahkan yang kuat untuk menciptakan keseimbangan. Dalam pemberdayaan masyarakat, kita perlu memiliki visi/tujuan yang sama agar konsep yang jelas. Dalam pemberdayaan masyarakat, sangat jelas bahwa sasaran utamanya adalah masyarakat yang 'tidak berdaya' (miskin), dan faktanya sebagian besar masyarakat miskin tinggal di perkotaan (sarang kemiskinan). Maka dalam program pemberdayaan masyarakat (untuk

¹ Suharto, Keberhasilan Pemerintah Kelurahan dalam Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan di Kota Semarang, Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum QISTIE Vol.14 No.1, 2021, h. 43

penanggulangan kemiskinan) selalu didorong untuk ‘*pro poor*’ dan lebih memberikan peluang yang besar terhadap peran kelambagaan komunitas lokal.²

Kemanusiaan, keseimbangan, keuntungan, perlindungan, penghormatan terhadap hak dan kewajiban, kesetaraan gender dan non-diskriminasi, norma dan agama adalah prinsip-prinsip dalam melaksanakan pembangunan kesehatan. Untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, pembangunan kesehatan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar dapat hidup sehat.³

Salah satu definisi pemberdayaan adalah proses memberi orang lebih banyak kekuasaan dari keputusan dan tindakan yang mempengaruhi kesehatan mereka. Hal ini bertujuan agar melibatkan individu dan kelompok yang paling rentan dengan meningkatkan keterampilan dalam hidup mereka dan memperluas dampaknya terhadap isu-isu yang mempengaruhi kondisi sosial dan ekonomi mereka. Di sisi lain, pemberdayaan masyarakat merupakan inisiatif Pemerintah Indonesia dan *United Nations International Children's Emergency Fund* (UNICEF) yang bertujuan untuk dapat meningkatkan pengetahuan dan kapasitas masyarakat dalam mengidentifikasi masalah, merencanakan solusi, dan mengimplementasikan inisiatif lokal. Pemberdayaan masyarakat didefinisikan sebagai upaya fasilitasi yang tidak

² Suharto, Keberhasilan Pemerintah Kelurahan dalam Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan di Kota Semarang, *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum QISTIE* Vol.14 No.1, 2021, h. 46 - 47

³ Eska Perdana Prasetya, Abdul Rahman, Fatimah Rahmalia, *Pemberdayaan Masyarakat Tentang Kesehatan, Pendidikan dan Kreatifitas*, Vol.2 No.1, 2018, h. 19

membutuhkan sumber daya yang berasal dari lembaga lintas sektoral, LSM, dan tokoh masyarakat.⁴

Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2018 tentang Kecamatan, bahwa kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari daerah kabupaten/kota yang dipimpin oleh camat, Kelurahan digambarkan sebagai wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah kotamadya atau kabupaten yang berada di bawah kecamatan. Oleh karena itu, kelurahan dan keputusan-keputusan yang diambil oleh pemerintah kabupaten atau kota di bawah kecamatan memiliki keterkaitan yang erat (termasuk dalam hal pembinaan dan pengawasan terhadap aparatnya). Demikian pula halnya dengan pelaksanaan otonomi daerah yang melibatkan permukiman perkotaan sebagai salah satu komponennya. Oleh karenanya itu, pemerintah kelurahan harus memiliki kemampuan yang lebih baik untuk memenuhi tuntutan tugas yang semakin berat. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk meningkatkan kapasitas pemerintah kelurahan dalam pengambilan inisiatif, perencanaan, dan pengendalian untuk mencapai kinerja pemerintahan yang baik.⁵

Berdasarkan Peraturan Walikota (Perwali) Parepare Nomor 38 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan, (Pasal 2 ayat 2) yaitu bertujuan untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan dalam melaksanakan pelayanan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;

⁴ Endang Sutisna Suleman, dkk. *Model Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan, Studi Program Desa Siaga*, Jurnal Kesehatan Masyarakat Nasional, Vol.7 No.4, 2012, h. 187

⁵ Anugrah Rio Saputra, *Kinerja Aparatur Pemerintah Kelurahan Dalam Pelayanan Publik di Kelurahan Pasar Pagi Kecamatan Samarinda Kota*, eJournal Administrasi Negara, Vol.3 No.2, 2014, h.703

meningkatkan kemampuan lembaga kemasayarakatan di kelurahan; meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan kerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat kelurahan; dan mendorong peningkatan swadaya gotong royong masyarakat. (Pasal 3 huruf b) yaitu pemberdayaan masyarakat kelurahan, dan (Pasal 5 huruf a) yaitu pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat.⁶

Bagian dari proses pemberdayaan adalah mengajarkan nilai-nilai budaya kontemporer seperti tanggung jawab, penghematan, dan kerja keras. Nilai-nilai ini membentuk tiga pilar utama pemberdayaan masyarakat sebagai model pengembangan masyarakat. menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan potensi masyarakat (pemberdayaan); membangun potensi masyarakat (pemberdayaan); dan melindungi dan membela. Ini (melindungi) kepentingan masyarakat bawah..⁷

Secara khusus, program aksi yang dilaksanakan oleh pemerintah Kelurahan telah melibatkan secara aktif seluruh komponen 'masyarakat' dalam pengambilan keputusan, implementasi dan konservasi. Program-program kegiatan pemberdayaan masyarakat seringkali kurang optimal dalam hal pemberdayaan masyarakat, karena cenderung kurang melibatkan masyarakat secara aktif dan hanya bersifat seremonial. Menabung untuk kemudian hari juga tidak berhasil.⁸

Pemberdayaan masyarakat adalah proses di mana dalam masyarakat, terutama mereka (masyarakat) yang kurang memiliki akses terhadap sumber daya pembangunan, didorong untuk meningkatkan kemandirian mereka dalam

⁶ Peraturan Walikota Parepare Nomor 38 Tahun 2019, h. 4

⁷ Munawar Noor, *Pemberdayaan Masyarakat*, Vol.1 No.2, 2011, h.98

⁸ Suharto, Keberhasilan Pemerintah Kelurahan dalam Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan di Kota Semarang, *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum QISTIE* Vol.14 No.1, 2021,h.47

pengembangan mata pencaharian. Pemberdayaan masyarakat juga merupakan proses siklus yang berkelanjutan. Ini adalah proses partisipatif di mana anggota masyarakat bekerja sama dalam kelompok formal dan informal untuk berbagi pengetahuan dan pengalaman serta bekerja untuk mencapai/mendapatkan tujuan bersama. Jadi, 'pemberdayaan masyarakat' adalah sebuah proses.⁹

Otonomi sebuah komunitas ditandai dengan kemampuannya untuk berpikir, memutuskan dan melakukan apa yang mereka anggap tepat dan menggunakan keterampilan yang dikembangkan untuk menemukan solusi bagi masalah yang dihadapi komunitas. Ini adalah keadaan yang berpengalaman. Keterampilan ini meliputi keterampilan kognitif, "motivasi/psikomotorik/emosional dan sumber daya fisik/material" lainnya. Masyarakat yang mengikuti proses pembelajaran yang baik secara bertahap akan memperoleh daya, kekuatan, atau kemampuan untuk secara mandiri mendukung proses pengambilan keputusan. Jelaslah bahwa keberdayaan masyarakat yang ditandai dengan kemandirian bisa dicapai melalui proses pemberdayaan masyarakat.¹⁰

Al-Qur'an memiliki banyak ayat yang berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat. *Al-Qur'an* juga memberikan solusi-solusi praktis (solusi parsial) yang dapat diterapkan untuk mendukung keberhasilan program pemberdayaan masyarakat. Konsep pemberdayaan masyarakat sangat sejalan dengan ajaran Islam. Selain mengajarkan tentang ketaatan kepada Tuhan, Islam juga mengajarkan manusia untuk

⁹ Defri, Achmad Bardjan Saleh, Ignatius Adiwidjaja, *Upaya Pemerintah Kelurahan dalam Rangka Pemberdayaan Pelayanan Masyarakat*, Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Vol.3 No.2, 2014, h. 12

¹⁰ Kesi Widjajanti, *Model Pemberdayaan Masyarakat*, Jurnal Ekonomi Pembangunan, Vol.12 No.1, 2011, h. 16

peduli terhadap sesama. Artinya, pemberdayaan masyarakat merupakan bentuk perwujudan nilai-nilai kemanusiaan yang terkandung dalam ajaran Islam. Pemberdayaan adalah gerakan yang terus menerus dilakukan sebagai bagian dari perubahan. Melalui pemberdayaan, kita dapat mengubah masyarakat untuk kehidupan agar lebih baik.¹¹

Prinsip perubahan dalam Islam terdapat dalam Q.S Ar-Ra'd/13 : 11 :

لَهُ مُعَقَّبَاتٌ مِّنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُمْ مِّنْ دُونِهِ مِنْ وَالٍ

Terjemahannya:

“Baginya (manusia) ada malaikat-malaikat yang selalu menjaganya bergiliran, dari depan dan belakangnya. Mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya dan tidak ada pelindung bagi mereka selain Dia”.¹²

Sayyid Qutb menyatakan bahwa ayat ini berbicara tentang perubahan yang dibutuhkan manusia. Bagi-Nya, Allah tidak mengubah manfaat, musibah, kemasyhuran, keburukan, status, atau kehinaan kecuali jika mereka mengubah perasaan, tindakan, dan realitas kehidupan mereka. “Allah swt tidak akan mengubah

¹¹ Achmad Saeful dan Sri Ramdhayanti, *Konsep Pemberdayaan Masyarakat dalam Islam*, Vol.3, 2020, h.5-6

¹² *Al – Qur’an Al - Karim*

kondisi seseorang menjadi lebih baik kecuali jika Allah swt memiliki keinginan untuk mengubahnya”.¹³

Kita membutuhkan dorongan dari orang lain untuk membuat perubahan positif. Ini adalah sifat dasar manusia yang merupakan makhluk sosial. Konsep pemberdayaan dicari dalam bidang ini. Dalam konsep ini, perubahan yang dialami oleh masyarakat miskin mencerminkan bagaimana pemerintah dan pihak-pihak yang berkuasa mendorong dan memotivasi masyarakat miskin untuk merubah kehidupan mereka.

Ada tiga (3) prinsip pemberdayaan masyarakat menurut Alquran. Yang pertama adalah filosofi penuntun Ukhuwa. Dalam kerangka Ukhuwa Islamiyah dan Ukhuwa Insanya, Islam mendorong pemeluknya untuk saling mendukung. Prinsip kedua adalah Ta'awun. Prinsip ini menegaskan kembali bahwa program pemberdayaan merupakan tugas bersama dan harus dibangun dalam sinergi yang kuat antara pengambil keputusan, pegiat sosial, dan masyarakat luas. Islam sangat menekankan kesetaraan semua orang, yang merupakan prinsip ketiga.

Dari sudut pandang Al-Qur'an, ada tindakan yang dapat diambil untuk membantu keberhasilan inisiatif pemberdayaan masyarakat Anda. Yang pertama adalah pertumbuhan pribadi yang berkelanjutan. Program untuk pemberdayaan komunitas klien harus memungkinkan peserta bekerja menuju perbaikan diri mereka sendiri dan standar hidup yang lebih tinggi. Kedua, menggunakan keterampilan mereka untuk memberikan pendidikan dan bimbingan kepada masyarakat. Ketiga,

¹³ Sayyid Qutb, *Tafsir Fi Zilalil Qur'an*, terj. As'ad Yadin dkk (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), h.38

implementasi dan promosi *zakat* dan *infaq*. Kedua program ini sangat efektif dalam mengangkat masyarakat dari garis kemiskinan. Selain itu, Zakat harus dikelola secara lebih efektif dan profesional agar pemberdayaan yang dilakukan lebih efektif. Terakhir, hindari praktik-praktik ekonomi yang dilarang oleh Islam, seperti penimbunan dan monopoli (*ihthiqar*). Tindakan ini merugikan di masyarakat dan bertentangan dengan ajaran Islam yang membawa semangat keadilan sosial.

Salah satu strategi kunci untuk mengatasi kemiskinan adalah pemberdayaan masyarakat. Islam, agama Ramatan Lil Aramin, menyerukan para penganutnya untuk bekerja demi kesetaraan dan kemakmuran bagi semua. Dari perspektif Islam, inisiatif pemberdayaan masyarakat yang berpegang pada prinsip-prinsip Islam dan memberdayakan orang beriman untuk menyebarkan rahmat Allah.¹⁴

Salah satu bentuk pemberdayaan masyarakat dibidang kesehatan di Kelurahan Lompoe Kota Parepare yaitu layanan pemeriksaan kesehatan gratis untuk masyarakat Kelurahan Lompoe yang biasanya bergilir ditiap keluarahan setiap bulannya. “Pemeriksaan kesehatan gratis ini supaya masyarakat bisa secara rutin memeriksakan dirinya tanpa harus ke puskesmas atau rumah sakit cukup dengan datang ke rumah RT atau RW karena tenaga medis dari Call Center Parepare yang akan turun langsung. Pemeriksaan kesehatan yang utama oleh tenaga medis adalah cek gula darah, kolesterol, asam urat dan tensi/tekanan darah. Juga tentunya sudah disediakan obat”.¹⁵

¹⁴ Ulfi Putra Sany, *Prinsip-Prinsip Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Al-Qur'an*, Jurnal Ilmu Dakwah, Vol.39 No.1, 2019, h.12

¹⁵ Ramli Podi, Ketua RW 003 Kelurahan Lompoe Kota Parepare, *Wawancara di Wekke'e* Pukul 09.30 WITA, Hari Jumat, Tanggal 16 Juli 2021.

Hal serupa dituturkan oleh seorang warga selaku pasien yang merasa cukup terbantu dengan adanya pemeriksaan kesehatan gratis ini. “Kalau saya merasa senang ada pemeriksaan seperti ini karena tidak perlu lagi repot-repot pergi puskesmas atau rumah sakit, tapi waktunya hanya satu hari yang biasanya hanya sampai jam 11.00 WITA dan hanya sekali sebulan itupun kalau ada lagi, setau saya sebenarnya tidak satu bulan sekali karena masing-masing kelurahan ada jadwalnya”.¹⁶

Dari hasil wawancara penulis akan menyimpulkan data yang ada dengan wawancara selanjutnya dari penelitian “Peran Pemerintah Daerah dalam Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Lompoe Kota Parepare (*Analisis Al – Dharuriyah Al - Khamsah*)”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana prinsip sukses dalam Pemberdayaan Layanan Kesehatan Masyarakat di Kelurahan Lompoe Kota Parepare?
2. Bagaimana peran Pemerintah Daerah dalam Pemberdayaan Layanan Kesehatan Masyarakat di Kelurahan Lompoe Kota Parepare menurut *Al – Dharuriyah Al - Khamsah*?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui prinsip sukses dalam Pemberdayaan Layanan Kesehatan Masyarakat di Kelurahan Lompoe Kota Parepare.

¹⁶ Anti, Pasien/Warga Kelurahan Lompoe Kota Parepare, *Wawancara di Wkke’e Pukul 17.09 WITA Hari Senin, Tanggal 2 Agustus 2021.*

2. Untuk mengetahui peran Pemerintah Daerah dalam Pemberdayaan Layanan Kesehatan Masyarakat di Kelurahan Lompoe Kota Parepare menurut *Al – Dharuriyah Al - Khamsah*.

D. Kegunaan Penelitian

Beberapa manfaat di penelitian ini agar dapat berdaya guna:

1. Manfaat Teoritis, dapat menjadi dasar untuk mengetahui sejauh mana peran Pemerintah Kelurahan dalam Pemberdayaan Layanan Kesehatan Masyarakat di Kelurahan Lompoe Kota Parepare.
2. Kegunaan Praktis, diharapkan dapat dijadikan bahan masukan/referensi untuk para peneliti yang akan melakukan penelitian yang sejenis penelitian ini.
3. Manfaat Praktis, diharapkan dapat menambah wawasan dan pengalaman akademis bagi penulis/pembaca, serta dapat digunakan sebagai bahan untuk proses perkuliahan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevan

Berdasarkan hasil penelusuran, peneliti menemukan beberapa penelitian lain yang dianggap relevan untuk mendukung penelitian ini. Berdasarkan tinjauan penelitian atau hasil penelitian terdahulu, peneliti menemukan beberapa penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini, antara lain:

Penelitian pertama dilakukan oleh Imelda Fitri, Rifa Rahmi dan Hotmauli dari Universitas Abdurrah Pekanbaru dengan judul Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Melalui Upaya Pemberdayaan Masyarakat.¹⁷ Kesamaan yang terdapat dalam penelitian ini adalah membahas topik promosi kesehatan masyarakat. Perbedaannya adalah penelitian yang dilakukan oleh penulis menggunakan wawancara dan dokumen untuk mendapatkan hasil, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Imelda Fitri, Rifa Rahmi, dan Hotmauli menggunakan metode kuesioner dengan Data yang dianalisis dengan menggunakan uji *korelasi pearson* dan uji *regresi linier*.

Penelitian kedua yang dilakukan oleh Nurul Purbasari dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dengan judul Pemberdayaan Masyarakat Melalui Kegiatan Daur Ulang Sampah Plastik.¹⁸ Persamaan dari penelitian ini adalah membahas masalah pemberdayaan kesehatan masyarakat, dan terdapat perbedaan. Singkatnya, penelitian yang dilakukan oleh penulis membahas tentang peran pemerintah desa dalam

¹⁷ Imelda Fitri, Rifa Rahmi dan Hotmauli, “Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Melalui Upaya Pemberdayaan Masyarakat”, *Faletahan Jurnal Kesehatan*, Vol.8 No.2, 2021.

¹⁸ Nurul Purbasari, “Pemberdayaan Masyarakat Melalui Kegiatan Daur Ulang Sampah Plastik”, *Skripsi*, UIN Syarif Hidayatullah, 2014.

pelayanan kesehatan masyarakat, program sosialisasi kesehatan, program pemeriksaan kesehatan gratis, dan gaya hidup sehat dan bersih sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Nurul Purbasari yaitu Kegiatan pemberdayaan adalah pengelolaan sampah dan masalah sampah ini juga terjadi di Depok. Artinya, sampah menumpuk di mana-mana dan berbagai upaya dilakukan untuk mengatasi penumpukan sampah.

Penelitian ketiga yang dilakukan oleh Merritama Anggie dari UIN SMH Banten dengan judul Pemberdayaan Masyarakat oleh LAZ Harfa Melalui Program Pemicuan STBM Bidang Kesehatan.¹⁹ Persamaan dari penelitian ini adalah membahas tentang pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan, sedangkan perbedaannya adalah Penelitian penulis menekankan pada peran pemerintah desa dalam memperkuat pelayanan kesehatan masyarakat, program sosialisasi kesehatan, program pemeriksaan kesehatan gratis, dan sosialisasi hidup bersih dan sehat, sedangkan penelitian Merritama Anggie berupaya mencegah berbagai macam penyakit lingkungan seperti diare dan ispa.

B. Tinjauan Teori

Penelitian ini menganalisis masalah yang diteliti dan menggunakan beberapa kerangka teori juga konsep sebagai dasar untuk menjawab pertanyaan yang diteliti. Teori yang digunakan adalah:

¹⁹ Merritama Anggie, "Pemberdayaan Masyarakat Oleh LAZ Harfa Melalui Program Pemicuan STBM Bidang Kesehatan", Skripsi, UIN SMH, 2019.

1. Teori Peran

Menurut Soekanto, Peran adalah aspek dinamis dari suatu kedudukan (status) ketika seseorang menjalankan hak dan kewajibannya dengan benar dan kemudian perannya. Pembagian peran berdasarkan Sukanto dibagi menjadi tiga kelompok, yaitu:²⁰

- a. Peran dinamis, Ini adalah tanggung jawab yang diberikan oleh administrator atau eksekutif grup..
- b. Peran partisipasi, yaitu suatu peran yang diberikan oleh anggota kelompok kepada kelompoknya yang memberikan sumbangan bermanfaat untuk kelompoknya.
- c. Peran pasif, yaitu suatu anggota kelompok menahan diri agar diberikan kesempatan kepada fungsi lain dalam kelompok sehingga dapat berjalan dengan baik.

Berdasarkan penjelasan mengenai peran sebelumnya, peneliti dapat menyimpulkan bahwa peran mengacu pada tindakan yang menyebabkan individu atau organisasi melakukan kegiatan yang sesuai tujuan juga ketentuan yang telah disepakati.

Dengan demikian hal tersebut dapat diterapkan fungsi peran kepada pemerintah kelurahan, di mana berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2018 tentang Kecamatan, bahwa kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari daerah kabupaten/kota yang dipimpin oleh camat, disebutkan kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah kabupaten

²⁰ Erni Maulain dkk., *Peran Pemerintah Kelurahan Dalam Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Pada Bidang Kesehatan Di Kelurahan Cijawura Kota Bandung*, Jurnal Identitas.

atau daerah kota dibawah kecamatan.²¹ Berdasarkan Peraturan Kementrian Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan dalam Pasal 5 ayat (2) menjelaskan bahwa kegiatan pemerintah kelurahan mempunyai fungsi dalam melakukan pemberdayaan masyarakat salah satu diantaranya adalah pengelolaan layanan kesehatan masyarakat.²²

2. Teori Pemberdayaan

Istilah "pengembangan masyarakat" dan "pemberdayaan masyarakat" sering digunakan secara bergantian, sulit untuk membedakannya. Pemerintah kota harus secara sadar memberdayakan masyarakat untuk mendukung perencanaan, pengambilan keputusan, dan pengelolaan sumber daya sehingga mereka dapat bertindak secara berkelanjutan dalam hal lingkungan, masyarakat, dan urusan mereka sendiri dalam jangka panjang.. Oleh karena itu, pemberdayaan masyarakat ini terkait sangat erat dengan pembangunan berkelanjutan, yang mengharuskan masyarakat untuk tetap hidup dan mandiri secara ekonomi, lingkungan, dan sosial.²³

Untuk menciptakan paradigma baru dalam pemberdayaan partisipatif, pembangunan berbasis masyarakat, dan pembangunan berkelanjutan, maka pengertian pemberdayaan masyarakat memadukan nilai-nilai masyarakat dengan pembangunan ekonomi. Pemberdayaan masyarakat sebagai salah satu alternatif strategi pembangunan telah banyak muncul dalam berbagai literatur dan gagasan, namun pada praktiknya belum maksimal dalam implementasinya. Hal tersebut,

²¹ Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan

²² Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan

²³ Munawar Noor, *Pemberdayaan Masyarakat*, Vol.1 No.2, 2011, h.88

ditambah dengan kemampuan masyarakat untuk menahan pertumbuhan ekonomi, telah menjadi topik perdebatan publik tentang kemajuan dan transformasi negara di masa depan.

3. Al – Dharuriyah Al - Khamsah

Al-dharuriyyah adalah segala sesuatu yang harusnya ada untuk kemaslahatan agama dan dunia ini. Jika *al-dharuriyyah* tidak ada dan ‘terpelihara dengan baik’, maka kehidupan manusia di dunia dan akhirat akan terganggu. Dengan kata lain, *al-dharuriyyah* merupakan tujuan yang esensial bagi pemeliharaan kepentingan manusia. Al-Dharuriyah al-Khams, atau "agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta," adalah lima kebutuhan manusia yang sangat mendasar yang harus dipertahankan agar hukum Islam dapat mencapai tujuan yang dimaksudkan.²⁴

Al-dharuriyah al-khamsah merupakan ungkapan yang mirip dengan Maqasid Syariah. Imam al-Ghazali dikreditkan dengan atau merupakan pencetus kata tersebut. Secara definisi, ulama modern telah memperkenalkan Maqasid Syariah. Ibnu Asyur adalah salah satunya. Beliau memberikan dua penjelasan tentang Maqasid Syariah, yaitu “umum dan khusus”. Secara umum, Maqasid Syariah adalah kompilasi dari makna dan ilmu yang diturunkan Allah SWT dalam semua atau sebagian besar syariah. Definisi yang tepat adalah apa yang Allah (swt) kehendaki untuk mencapai tujuannya, yaitu mempertahankan tujuan manfaat umat manusia, atau keunggulan umum khususnya dalam perbuatan mereka.²⁵

²⁴ <https://suduthukum.com/2018/07/al-dharuriyyat-dalam-hukum-islam.html>

²⁵ Said Abadi, *Perlindungan Nasabah Muslim dalam Transaksi Non-Tunai Perseptif Al-Dharuriyah AL-Khamsah*, I-JIEF : Indonesian Journal of Islamic Economics and Finance; Vol.1, No.2, 2021, h. 121-122

Konsep maqasid al-syariah, atau tujuan hukum Islam, sangat dikenal dalam Islam. Maksud dan tujuan umum maqashid al-syariah/syariah terangkum dalam lima poin. Perlindungan dan pemeliharaan agama (hifdz al-din), perlindungan dan pemeliharaan jiwa (hifdz al-nafs), perlindungan dan pemeliharaan akal (hifdz al-aql), perlindungan dan pemeliharaan keturunan (hifdz al-nasl), dan perlindungan dan pemeliharaan tubuh (hifdz al-nasl), termasuk di antara lima rukun Islam (perlindungan dan pemeliharaan harta benda).

Menurut Al-Ghazali, Dharuriyat adalah varian dari Maslahat dan memastikan pemeliharaan lima tujuan. Mempertahankan agama, kehidupan, jiwa, harta, keturunan dan nasab. Sedangkan Asy-Syatibi mendefinisikan Syariah sebagai tujuan untuk mewujudkan kepentingan manusia di dunia dan akhirat. Asy-Syatibi, seperti halnya Al-Ghazali, menyatakan bahwa kemaslahatan manusia dapat dicapai ketika lima elemen dasar kehidupannya terpenuhi. Agama, jiwa, roh, keturunan, harta. Dalam kerangka ini, Asy-Syatibi mengklasifikasikan Maqashid Syariah ke dalam tiga tingkatan, yaitu Dharuriyah, Hajiyah, dan Tashniyah. Untuk mendapatkan kepuasan manusia di dunia dan akhirat, tingkat Daryat harus dicapai. Pemeliharaan lima komponen dasar kehidupan manusia diperlukan pada tingkat ini. Mengabaikan kelima komponen dasar ini akan mengakibatkan kerugian di dunia dan kerugian di akhirat.

Tingkat *hajiyyat* adalah unsur-unsur yang membuat hidup lebih mudah dan menghilangkan kesulitan darinya. Misalnya, berbagai bentuk izin untuk terlibat dalam mudarava, musakat, muzara'ah, dan kegiatan ekonomi lainnya yang bertujuan untuk membuat hidup lebih mudah di dunia atau menghilangkan kesulitan dari kehidupan

manusia. Ada berbagai jenis izin usaha. *Tasinyat* biasa merupakan unsur penyempurna, pelengkap dan penghias kehidupan.²⁶

Klasifikasi tingkat *Maqasid Syariah* Syathibi memperlihatkan pentingnya melindungi lima (5) elemen yang utama di kehidupan manusia. Ketiga tingkatan ini tidak dapat dipisahkan. *Dharuriyat* menunjukkan kebutuhan yang harus dipenuhi, *Hajiyat* menunjukkan kenyamanan ketika dipenuhi, dan *Tahsiniyat* menjadi pelengkap atau tambahan. Jika sebuah rumah dianggap sebagai dariyat, maka fasilitas yang ada di dalam rumah adalah hajiyat, dan dekorasi, taman, atau hal-hal lain yang membuat rumah menjadi lebih indah adalah *tashinyat*.

Pengertian memelihara setidaknya memiliki dua makna, yaitu:

1. Muru'ah min janib al-wujd adalah aspek yang memperkuat baik bagian penyusunnya maupun dasarnya. Pengabdian pada iman dapat menjadi contoh dalam menegakkan agama.. Misalnya, dua kalimah syahadat, shalat, puasa, ziarah ke Mekkah. Dalam hal pemeliharaan diri dan jiwa, kita diwajibkan untuk mencari, misalnya, makanan, minuman, pakaian, dan tempat tinggal. Di bidang pemeliharaan lainnya, Peraturan Mengenai Perkawinan dan Ras Campuran Secara Umum.
2. Aspek-aspek yang mengantisipasi lima kebutuhan dasar agar tidak terganggu dan terpelihara dengan baik, disebut *Mulua Min Janib Al-Adam*. Sebagai contoh, aturan untuk pembunuh, pemabuk, pencuri, pezina, dan lain-lain yang

²⁶ Said Abadi, *Perlindungan Nasabah Muslim dalam Transaksi Non-Tunai Perseptif Al-Dharuriyah AL-Khamsah*, I-JIEF : Indonesian Journal of Islamic Economics and Finance; Vol.1, No.2, 2021, h. 123

ditetapkan di ranah Jinaya memberlakukan hukuman yang berat terhadap tindakan mereka.

Oleh karena itu, pada aspek pertama, pemeliharaan dicapai dengan memenuhi semua perintah yang berkaitan dengan lima hal dasar kehidupan manusia. Di sisi lain, aspek kedua menekankan bahwa ia menghindari atau meninggalkan semua tindakan yang dapat merusak kelima hal tersebut.²⁷

C. Kerangka Konseptual

1. Konsep Pemberdayaan Masyarakat

Piagam Ottawa menggarisbawahi bahwa pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan sangat bergantung pada partisipasi masyarakat. Selain itu, Konferensi Internasional Promosi Kesehatan ke-7 yang akan berlangsung di Nairobi, Kenya, menegaskan kembali pentingnya pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan dengan mengakui perlunya meningkatkan kapasitas kesehatan, memperkuat sistem kesehatan, mendorong kemitraan dan kerja sama lintas sektor, dan mempromosikan pemberdayaan masyarakat melalui kesadaran dan tindakan.²⁸

Tujuan pemberdayaan adalah untuk memobilisasi individu dan kelompok yang rentan dengan meningkatkan keterampilan hidup inti dan memengaruhi masalah sosial dan ekonomi utama. Ini adalah bentuk kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. Ini adalah teknik yang berhasil. Pemberdayaan didefinisikan sebagai proses mendapatkan kontrol yang lebih besar atas keputusan dan tindakan yang diberikan. Menurut Pemerintah Indonesia dan *United Nations International*

²⁷ <https://suduthukum.com/2018/07/al-dharuriyyat-dalam-hukum-islam.html>

²⁸ Endang Sutisna, dkk., *Model Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan, studi Program Desa Siaga*, Artikel Penelitian, h. 186

Children's Fund, pemberdayaan masyarakat mencakup identifikasi masalah, perencanaan solusi, dan perluasan pengetahuan serta kapasitas masyarakat untuk mengimplementasikannya dengan menggunakan potensi lokal dan kapasitas yang ada. Termasuk semua upaya nonpendidikan yang dilakukan oleh lembaga-lembaga Fasilitas baik yang dari lembaga lintas sektoral maupun LSM dan tokoh masyarakat.²⁹

Sepuluh model pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan dapat dikembangkan sebagai berikut: Pertama, model pembangunan daerah mendefinisikan pemberdayaan masyarakat sebagai upaya untuk mengatasi masalah lingkungan melalui keterlibatan masyarakat dan pengembangan sumber daya dan potensi lokal. Kedua, konsep promosi kesehatan dilaksanakan dengan menggunakan empat strategi: pemberdayaan masyarakat, konseling kesehatan individu, kepercayaan kesehatan, dan tindakan legislatif..

Ketiga, Model promosi kesehatan interdisipliner yang mempertimbangkan lima pendekatan: pengobatan, perilaku, pendidikan, pemberdayaan, dan perubahan sosial. Keempat, Model promosi kesehatan multidisiplin yang mempertimbangkan lima pendekatan: Pengobatan, perilaku, pendidikan, pemberdayaan dan perubahan sosial - layanan kesehatan primer berbasis layanan masyarakat yang membuat masyarakat bertanggung jawab dalam mengidentifikasi dan memprioritaskan kebutuhan, merencanakan dan memberikan layanan kesehatan, serta memantau dan mengevaluasi layanan kesehatan. Kelima, model pemberdayaan masyarakat

²⁹ Endang Sutisna, dkk., *Model Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan, studi Program Desa Siaga*, Artikel Peneliti, h. 186

mencakup partisipasi, kepemimpinan, keterampilan, sumber daya, nilai-nilai, sejarah, jaringan, dan pengetahuan masyarakat. Keenam, model pengorganisasian masyarakat adalah hubungan antara pemberdayaan, kemitraan, partisipasi, daya tanggap budaya, dan kapasitas masyarakat. Ketujuh, determinan sosial ekonomi dari model kesehatan meliputi pendidikan, pekerjaan, pendapatan, dan modal atau kekayaan yang berhubungan dengan kesehatan. Kedelapan, model kesehatan masyarakat dan ekosistem berinteraksi antara masyarakat, lingkungan, ekonomi dan kesehatan. Kesembilan, model penentu lingkungan kesehatan individu dan masyarakat Penentu lingkungan kesehatan individu meliputi lingkungan psikososial, lingkungan mikro, lingkungan ras/kelas/jenis kelamin, lingkungan perilaku, dan lingkungan kerja. Di sisi lain, faktor penentu lingkungan kesehatan masyarakat meliputi lingkungan politik/ekonomi, lingkungan makro-fisik, tingkat keadilan dan pemerataan sosial di masyarakat, serta peningkatan kontrol dan kohesi di masyarakat.

Kesembilan, model pengelolaan penyakit berbasis keluarga di mana pelayanan kesehatan diberikan secara mandiri oleh keluarga dengan meningkatkan kesadaran, menyebarkan pengetahuan dan memelihara teknologi kesehatan. Kesepuluh, Model Pembangunan Kesehatan Masyarakat Desa (PKMD).³⁰

Pendidikan dan literasi mempengaruhi kesehatan. Pendidikan secara langsung mempengaruhi kesehatan. Tingkat pendidikan didefinisikan sebagai penentu lingkungan kesehatan. Faktor pengetahuan dalam pemberdayaan masyarakat juga dimasukkan sebagai penentu lingkungan kesehatan. Model pengelolaan penyakit

³⁰ Endang Sutisna, dkk., *Model Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan, studi Program Desa Siaga*, Artikel Peneliti, h. 186

berbasis keluarga dikembangkan melalui peningkatan pengetahuan dan keterampilan serta peningkatan kesadaran.

Akses terhadap informasi kesehatan termasuk pengetahuan tentang kesehatan. Proses pemberdayaan masyarakat membutuhkan fasilitator yang berperan dalam mempengaruhi proses pengambilan keputusan masyarakat untuk mengadopsi inovasi. Modal sosial mengacu pada kemampuan untuk mengidentifikasi masalah kesehatan melalui berbagi informasi. Tetangga saling menasehati, memberikan saran, dan memberikan informasi tentang akses ke layanan kesehatan.

Menurut pendekatan ini, anggota masyarakat menjadi lebih sadar akan perlunya perubahan dan berkomitmen terhadapnya ketika mereka terlibat dalam lingkungan pembangunan seperti SMD. Mereka juga lebih mampu menghargai dan memahami berbagai perspektif dan pengalaman anggota masyarakat lainnya. Meningkatkan kesempatan untuk penyelesaian masalah kesehatan dan mengajarkan kecakapan hidup. Wanita dengan pendidikan dasar hampir lima kali lebih mungkin daripada wanita yang tidak berpendidikan untuk memilih bidan terlatih untuk melahirkan. Selain itu, perempuan dengan pendidikan dasar hampir tiga kali lebih mungkin dibandingkan wanita dengan sedikit atau tanpa pendidikan untuk menggunakan kontrasepsi modern dan mendapatkan empat kali pemeriksaan kesehatan (K4). Ukuran tubuhnya menjadi dua kali lipat. Lingkungan itu berpengetahuan luas, berpengalaman, dan bijaksana. Salah satu prinsip pemberdayaan masyarakat adalah membangkitkan kesadaran. Jika setidaknya empat dari kriteria berikut terpenuhi, kepemimpinan lokal dapat menumbuhkan kelompok masyarakat.

ketergantungan, keahlian, kemampuan komunikasi, dan tingkat kerjasama yang tinggi.³¹

Pemberdayaan secara konseptual berasal dari kata kekuasaan karena inti gagasan pemberdayaan dihubungkan dengan gagasan kekuasaan. Pemberdayaan masyarakat, dalam pandangan Sumaryadi, adalah upaya menyiapkan masyarakat untuk kondisi sosial yang berkelanjutan dan mencakup kemajuan menuju pertumbuhan, kemandirian, dan kebahagiaan. Dengan demikian, menggunakan pemberdayaan masyarakat sebagai cara untuk memberdayakan masyarakat dilakukan oleh mereka yang memiliki otoritas. Konsep pemberdayaan lanjut memiliki banyak definisi yang dikemukakan oleh para ahli yang sangat terlibat dalam upaya memajukan kepentingan bersama, seperti yang dikemukakan oleh Ife³² yaitu *“empowerment Means providing people with the resource, opportunities, knowledge and skills to increase their capacity to determine their own future, and to participate in and affect the life of their community”* (Pemberdayaan berarti memberikan sumber daya, kesempatan, pengetahuan dan keterampilan kepada masyarakat untuk menentukan masa depan mereka sendiri dan meningkatkan kemampuan mereka untuk berpartisipasi dan mempengaruhi kehidupan masyarakat).

Upaya-upaya yang dilakukan oleh partai politik untuk mendorong keterlibatan sosial dan meningkatkan kinerja masyarakat kelas bawah disebut sebagai pemberdayaan dalam arti istilah yang diberikan di atas. Kita membutuhkan dukungan yang lebih kuat untuk kemandirian, ‘otonomi/partisipasi’ dan demokratisasi. Dalam

³¹ Sumaryadi, *Perencanaan Pembangunan Daerah Otonom dan Pemberdayaan Masyarakat*, CV Citra Utama, h. 57.

³² Lasiman Sugiri, *Peranan Pemerintah Daerah dalam Pemberdayaan Masyarakat*, h. 60

pengertian tersebut, Ife menyimpulkan bahwa “*empowering is about increasing the power of the disadvantaged*” (pemberdayaan adalah mengenai peningkatan kekuatan dari kelemahan).³³

Pemberdayaan mengacu pada tindakan yang diambil oleh partai politik untuk mendorong keterlibatan sosial dan meningkatkan kinerja kelas bawah.. Ini adalah sebuah proses yang memberikan kekuatan untuk memecahkan masalah. Kehidupan yang lebih baik sehingga mereka dapat membentuk masa depan mereka seperti yang mereka inginkan.

Pemberdayaan masyarakat di daerah diharapkan juga memasukkan pengetahuan tersebut di atas melalui peran-peran yang digerakkan oleh otoritas lingkungan dan perangkatnya, dengan fokus khusus pada dukungan untuk meningkatkan kapasitas, potensi, dan kepercayaan diri anggota lingkungan. jaringan, sehingga penduduk setempat memiliki energi/kekuatan untuk mengatasi tantangan yang mereka hadapi dengan menggunakan cara-cara positif untuk mencapai kehidupan yang lebih tinggi, seperti dapat menentukannya. Pemberdayaan pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan energi jaringan, sehingga mereka dapat menaklukkan masalah yang mereka hadapi. Demikian juga diharapkan bahwa posisi otoritas lingkungan dan pejabatnya dapat mencapai tujuan pemberdayaan jaringan seperti di atas, setidaknya: dapat meningkatkan keuntungan manusia yang berada di tingkat bawah di dalam wilayah yang bersangkutan (melalui dukungan pemberdayaan moneter), dapat mengembangkan potensi atau kapasitas warga di dalam wilayah tersebut untuk meningkatkan olahraga sosio-moneter yang efektif bagi warga

³³ Lasiman Sugiri, *Peranan Pemerintah Daerah dalam Pemberdayaan Masyarakat*, hal. 60

kelurahan, serta meningkatkan potensi kelembagaan warga tersebut (melalui pemberdayaan instruksional, dan didukung oleh pemberdayaan sosio-budaya, psikologis, dan politik warga).

Kata "peran" berasal dari genre sinematik dan dramatik dan mengacu pada tindakan, tindakan/perbuatan, pemeran, aktor, pemain, dan peran (peran adalah fungsi, posisi, atau bagian). Peran yang melambangkan tatanan kelembagaan lembaga (dalam contoh ini pemerintah) merupakan komponen dinamis suatu lembaga dalam konteks kelembagaan). Jadi, "peranan adalah pelaksanaan fungsi oleh pemerintah Pengertian pemerintah daerah adalah Gubernur, Bupati, atau walikota, dan Perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah" (UU No. 32 Tahun 2004, Pasal I, ayat 3).

Pemberdayaan masyarakat adalah proses mengubah kekurangan seseorang menjadi kekuatan atau memberdayakan mereka dengan menyediakan alat, peluang, informasi, dan keterampilan yang mereka butuhkan untuk menentukan nasib mereka sendiri dan menjadi anggota masyarakat yang lebih aktif. Politik, pendidikan, ekonomi, sosial budaya, dan pemberdayaan psikologis semuanya terpengaruh. Untuk memperkuat kekuatan dan kelemahan masyarakat dalam penyediaan sumber daya, maka peran pemerintah daerah dalam pemberdayaan masyarakat adalah melaksanakan fungsi pemberdayaan masyarakat oleh gubernur, bupati/walikota, dan organisasi perangkat daerah. Hal ini dilakukan dalam rangka meningkatkan kesempatan, pengetahuan, dan keterampilan untuk menentukan masa depan masyarakat dan meningkatkan sense of agency masyarakat. Dari segi pendidikan,

ekonomi, sosial budaya, psikologi, dan politik, masyarakat lokal dikatakan berdaya apabila pemerintah daerah berhasil melaksanakan tugas pemerintahannya sendiri.

Proses pemberdayaan tidak terjadi dengan sendirinya, tetapi efektif karena melibatkan keterlibatan dan partisipasi masyarakat. Untuk mencapai dan menyukseskan pemberdayaan, partisipasi dan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi tidak hanya diperlukan, tetapi juga untuk “menyesuaikan pikiran” dan tindakan masyarakat dengan perkembangan yang terjadi, dan memberdayakan masyarakat sedemikian rupa sehingga mereka dapat memiliki emosi. Harus dibangun. Untuk secara bertanggung jawab memelihara hasil atau upaya yang telah dilakukan.

Oleh karena itu, partisipasi masyarakat sangat diharapkan dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat. “Tanpa partisipasi masyarakat, pembangunan akan berjalan lambat dan sulit untuk mencapai tujuan pembangunan yang sukses”.

1. Tahapan Pemberdayaan Masyarakat

Pada prinsipnya, tidak mungkin untuk bertindak secara langsung sesuai dengan esensi sesuatu. Namun, kita membutuhkan tahapan sebagai dasar untuk melaksanakan kegiatan. Dalam komunitas, pemberdayaan juga memiliki tahapan awal. Menurut Soekanto dalam pemberdayaan masyarakat memiliki setidaknya tujuh (7) tahapan yaitu sebagai berikut:³⁴

a. Tahapan persiapan

Pada tahap ini, ada dua hal yang perlu dilakukan. Yaitu penyiapan Petugas Pemberdayaan Masyarakat atau tenaga yang berkompeten di

³⁴ Andi Haris, *Memahami Pendekatan Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pemanfaatan Media*, Jupiter Vol. XIII No.2, 2014, h. 53-54.

bidangnya, dan penyiapan lapangan yang pada dasarnya merupakan upaya tidak langsung.

b. Tahapan pengkajian “*Assessment*”

Tahap ini dimaksudkan untuk mengumpulkan data atau informasi yang dianggap perlu oleh pihak berwenang jika ingin memberdayakan masyarakat.

c. Tahapan perencanaan alternatif program atau kegiatan

Ada beberapa faktor yang perlu diperhatikan saat ini agar tercipta strategi pemberdayaan yang efektif.

d. Tahapan pemformalisasi rencana aksi

Tahap ini membantu setiap kelompok untuk merumuskan dan menetapkan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan untuk mengatasi permasalahan yang ada.

e. Tahapan pelaksanaan “implementasi” program atau kegiatan

Pada tahap ini, peran masyarakat sebagai pelaksana diharapkan dapat menjaga keberlanjutan program yang dikembangkan.

f. Tahapan evaluasi

Pada tahap ini, proses pengawasan dilakukan oleh penghuni dan pengelola program dengan melibatkan warga.

g. Tahapan terminasi

Ini adalah tahap pemutusan hubungan secara resmi dengan komunitas target.

2. Prinsip - Prinsip Pemberdayaan Masyarakat

Mardikanto mengemukakan bahwa terdapat sejumlah prinsip pemberdayaan yang dapat digunakan sebagai kerangka acuan diantaranya:³⁵

1. Keberhasilan dari pemberdayaan bergantung pada kejelasan dari tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.
2. Masalah kurangnya profesionalisme, keseriusan, dan efektivitas disiplin fasilitator.
3. Keterlibatan dan kesiapan untuk persiapan Pemberdayaan Pelaksanaan Pekerjaan tergantung pada seberapa banyak masyarakat terlibat dalam menentukan tujuan program dan memilih pemangku kepentingan.
4. Penggunaan pengetahuan dan informasi baik di dalam maupun di luar masyarakat diyakini dapat meningkatkan kemandirian pemberdayaan.
5. Diperkirakan bahwa menggunakan pengetahuan dan informasi baik di dalam maupun di luar komunitas dapat meningkatkan kemandirian pemberdayaan.
6. Ketika sistem administrasi pemerintahan terdesentralisasi, hal ini tentu saja berdampak pada peningkatan partisipasi masyarakat.
7. Agar klien (penerima manfaat) dapat lebih efektif dengan fasilitator, perlu lebih banyak perhatian diberikan pada penggunaan pendekatan yang peka terhadap gender dalam kegiatan pemberdayaan.

³⁵ Andi Haris, *Memahami Pendekatan Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pemanfaatan Media*, Jupiter Vol. XIII No.2, 2014, h. 53-54.

8. Jika pemberdayaan terjadi dalam komunitas yang lebih tertutup dengan interaksi dan komunikasi yang teratur antara fasilitator dan penerima manfaat, maka akan lebih berhasil.
9. Tentu saja, perampingan lebih lanjut dari kegiatan pemberdayaan juga perlu didukung oleh kepemimpinan yang efektif.
10. Jika ada komunikasi dua arah antara peneliti, penyalur produk, sumber masukan, dan masyarakat, inisiatif pemberdayaan akan lebih berhasil.
11. Tindakan fasilitator berdampak besar dan meningkatkan partisipasi dalam proses pembelajaran, penerimaan inovasi, dan keterlibatan masyarakat.
12. Pemahaman yang baik di antara para praktisi pemberdayaan masyarakat memiliki dampak yang besar terhadap keberhasilan kegiatan pemberdayaan.
13. Penyelarasan antara tingkat biaya yang terkait dengan kegiatan pemberdayaan dan manfaat yang diperoleh dari kegiatan tersebut akan lebih baik jika mempertimbangkan berbagai faktor yang mempengaruhinya dari waktu ke waktu di setiap tempat di mana kegiatan berlangsung.
14. Persoalan kelangsungan kegiatan (kontinuitas) dapat terjaga dan terpelihara dengan baik manakala manfaat yang diperoleh jauh lebih besar dibandingkan dengan biaya yang harus dikeluarkan.
15. Masalah fleksibilitas dan kepekaan terhadap aspirasi dan kepentingan masyarakat, serta terbatasnya tujuan yang harus dicapai untuk meningkatkan

produksi. Semua ini sangat menghambat efektivitas upaya pemberdayaan masyarakat.

Menurut Dahana dan Bhatnagar bahwa terdapat beberapa prinsip yang perlu di perhatikan dalam proses pemberdayaan di antaranya:³⁶

1. *Kerjasama dan partisipasi.* Dalam hal ini, kegiatan pemberdayaan hanya dapat berhasil dilaksanakan apabila ada kerja sama yang kuat antara berbagai elemen masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan program yang telah dirancang sebelumnya.
2. *Menggunakan metode yang tepat.* Artinya, metode yang digunakan perlu disesuaikan dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat yang menjadi kelompok sasaran kegiatan pemberdayaan. Hal ini membuat metode-metode tersebut tidak hanya efisien dan efektif, tetapi juga tepat guna dan berdaya guna.
3. *Demokratis.* Artinya, proses yang dilakukan bersifat demokratis dalam artian memberikan kebebasan kepada masyarakat untuk memilih metode apa yang akan digunakan, termasuk proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh masyarakat itu sendiri ketika melakukan kegiatan pemberdayaan.
4. *Minat dan kebutuhan.* Dalam hal ini, pemberdayaan masyarakat harus didasarkan pada apa yang menjadi prioritas utama dan relevan dengan

³⁶ Andi Haris, *Memahami Pendekatan Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pemanfaatan Media*, Jupiter Vol. XIII No.2, 2014, h. 53-54.

kepentingan dan kebutuhan masyarakat. Hal ini membuat hasil yang dicapai menjadi lebih efisien dan efektif.

5. *Kelompok masyarakat bawah*. Untuk lebih mengoptimalkan pelaksanaan program-program yang telah dikembangkan sebelumnya, kegiatan pemberdayaan masyarakat perlu lebih menasar ke tingkat masyarakat akar rumput, kepada mereka yang selama ini masuk dalam kategori masyarakat yang terpinggirkan.
6. *Keragaman dlm budaya*. Kegiatan penguatan masyarakat disesuaikan dengan keragaman budaya yang ada di wilayah setempat, dan ada kekhawatiran bahwa penerapan prinsip-prinsip keragaman budaya pada kegiatan akan menimbulkan berbagai masalah dan hambatan di daerah tersebut.
7. *Terarah dan spesialis*. Dalam konteks ini, fasilitator/pelatih/agen pembaharu yang terlibat dalam kegiatan penguatan masyarakat harus memiliki keahlian dan keterampilan dalam isu-isu tertentu, terutama dalam kegiatan-kegiatan yang membutuhkan keahlian dalam kegiatan-kegiatan yang merupakan bagian dari penguatan masyarakat.
8. *Belajar sambil bekerja*. Artinya, kegiatan pemberdayaan masyarakat tidak hanya berupa pengajaran konsep dan gagasan teoritis, tetapi juga melibatkan kelompok sasaran secara aktif dalam melaksanakan kegiatannya sesuai arahan fasilitator. Masyarakat dapat bekerja sambil belajar menggunakan konsep-konsep yang diberikan oleh staf penyuluhan.

9. *Perubahan budaya.* Dalam hal ini, kegiatan penguatan masyarakat harus dilakukan sesuai dengan nilai-nilai budaya lokal kelompok sasaran. Dengan demikian, gegar budaya pada kelompok sasaran kegiatan pemberdayaan dapat dihindari, sehingga pendamping bertindak secara hati-hati dan memiliki pengetahuan yang cukup tentang nilai-nilai budaya kelompok masyarakat yang menjadi sasaran kegiatan pemberdayaan.
10. *Kepemimpinan.* Artinya, kegiatan pemberdayaan seharusnya tidak hanya menguntungkan satu pihak saja, misalnya pihak yang memberikan penyuluhan. Namun, yang sebenarnya diinginkan adalah bahwa kegiatan pemberdayaan ini harus dapat dimanfaatkan oleh para pemimpin yang ada dan diharapkan dapat membantu mereka untuk mengembangkan kegiatan pemberdayaan mereka.
11. *Segenap keluarga.* Hal ini dikarenakan kegiatan pemberdayaan yang dilakukan oleh para konselor memperlakukan keluarga sebagai bagian dari sistem sosial dan mengaktifkan peran keluarga yang saling bekerja sama agar aspirasi keluarga untuk mencapai tujuan kegiatan pemberdayaan dapat terwujud.

Ada empat prinsip utama yang biasa digunakan untuk program pemberdayaan yang sukses. Keempat prinsip tersebut adalah prinsip kesetaraan, partisipasi, kemandirian, dan keberlanjutan. Penjelasan dari keempat prinsip tersebut adalah

prinsip kesetaraan, prinsip partisipasi, prinsip keswadayaan dan kemandirian, dan prinsip keberlanjutan.³⁷

a. Prinsip Kesetaraan

Prinsip utama yang harus dipegang dalam setiap proses pemberdayaan masyarakat adalah kesetaraan atau kesederajatan antara masyarakat dan lembaga yang melaksanakan program pemberdayaan masyarakat. Kekuatan pendorong di balik ini adalah hubungan yang setara yang diciptakan dengan menciptakan sistem untuk berbagi pengetahuan, pengalaman, dan keterampilan. Setiap orang mengakui kekuatan dan kelemahan masing-masing sehingga terjadi proses saling belajar.

b. Prinsip Partisipasi

Program pemberdayaan yang dapat mendorong kemandirian masyarakat bersifat partisipatif dan dirancang, dilaksanakan, dipantau, dan dievaluasi oleh masyarakat. Namun, untuk mencapai tingkat ini membutuhkan waktu dan membutuhkan proses pendampingan yang melibatkan para pendamping yang terlibat secara mendalam dalam pemberdayaan masyarakat.

c. Prinsip Keswadayaan dan Kemandirian

Prinsip swadaya adalah tentang menghargai kemampuan komunitas dan memprioritaskan mereka daripada membantu orang lain. Tidak mempertimbangkan subjek (hanya memiliki sedikit subjek). Mereka memiliki

³⁷ Andi Haris, *Memahami Pendekatan Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pemanfaatan Media*, Jupiter Vol. XIII No.2, 2014, h. 53-54.

kemampuan untuk menabung, pengetahuan yang mendalam tentang kendala bisnis, pemahaman tentang kondisi lokal, tenaga kerja dan kemauan, dan norma-norma masyarakat yang telah lama ada. Semua ini harus digali dan digunakan sebagai inti dari proses pemberdayaan. Bantuan dari luar yang bersifat material harus dipandang sebagai pendampingan agar bantuan tersebut tidak melemahkan keswadayaan.

d. Prinsip Berkelanjutan

Program pemberdayaan harus berkelanjutan, meskipun pada awalnya peran fasilitator lebih dominan dibandingkan dengan masyarakat itu sendiri. Tapi secara perlahan dan pasti, peran pendamping akan makin berkurang, bahkan akhirnya dihapus, karena masyarakat sudah mampu mengelola kegiatannya sendiri.

3. Tujuan Pemberdayaan Masyarakat

Menurut Mardikanto menyebutkan ada 6 (enam) tujuan dalam pemberdayaan masyarakat, diantaranya yaitu: (1) perbaikan kelembagaan “*better institution*” (2) perbaikan usaha “*better bussiness*” (3) perbaikan pendapatan “*better income*” (4) perbaikan lingkungan “*better environment*” (5) perbaikan kehidupan “*better living*” (6) perbaikan masyarakat “*better community*”.³⁸

Pemberdayaan masyarakat adalah mengubah kelemahan menjadi kekuatan atau mempersiapkan mereka dalam hal sumber daya, kesempatan, pengetahuan dan keterampilan untuk menentukan masa depan mereka, untuk meningkatkan

³⁸ Erni Maulani, *Peran Pemerintah Kelurahan Dalam Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Pada Bidang Kesehatan di Kelurahan Cijawura Kota Bandung*, Jurnal Identitas, 4-6

kemampuan mereka dalam berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat itu sendiri, Dampaknya meliputi pemberdayaan pendidikan, ekonomi, sosial budaya, psikologis/kesehatan dan politik. Oleh karena itu, peran pemerintah daerah dalam pemberdayaan masyarakat adalah pelaksanaan fungsi-fungsi pemberdayaan masyarakat oleh gubernur, bupati/walikota, dan organisasi perangkat daerah, baik untuk memperkuat kekuatan dari kelemahan masyarakat, maupun untuk memperkuat kekuatan masyarakat dalam hal penyediaan sumber daya, yang dimaksudkan untuk meningkatkan, kesempatan, pengetahuan, dan keterampilan yang meningkatkan rasa memiliki masyarakat dalam menentukan masa depan masyarakat serta memungkinkan mereka berpartisipasi dan mempengaruhi kehidupan masyarakat itu sendiri. Pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan sendiri oleh pemerintah daerah dianggap berhasil jika pemerintah daerah diperkuat di bidang pendidikan, ekonomi, sosial budaya, psikologi/kesehatan dan politik.³⁹

Pemberdayaan masyarakat dalam Islam bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan, terutama dalam bidang ekonomi. Kebahagiaan adalah impian dan harapan setiap orang di dunia ini. Tidak ada satu orang pun yang tidak menginginkan kehidupan yang berkecukupan. Tindakan yang bertentangan dengan aspek kesejahteraan adalah bertentangan dengan ajaran Islam. Islam adalah agama yang menginginkan umatnya hidup sejahtera karena kesejahteraan merupakan awal dari lahirnya keuntungan. Untuk mencapai kesejahteraan, setiap orang harus mandiri secara finansial. Setidaknya ada dua hal yang dapat dilakukan seseorang untuk membangun kemandirian finansial. Yang pertama lebih berfokus pada potensi individu, sedangkan yang kedua lebih berorientasi pada sosial. Pemberdayaan

³⁹ Lasiman Sugiri, *Peranan Pemerintah Daerah dalam Pemberdayaan Masyarakat*, h. 60

masyarakat merupakan salah satu bentuk kesadaran sosial manusia. Semakin tinggi tingkat kesadaran sosial yang ada dalam diri manusia, maka semakin besar pula kemungkinan kita untuk mencapai pemberdayaan masyarakat.⁴⁰

4. Faktor – Faktor yang Berpengaruh Terhadap Proses Pemberdayaan Masyarakat

Tidak dapat dipungkiri bahwa tidak semua kegiatan berjalan sesuai dengan yang diharapkan atau selalu berjalan dengan lancar dan tanpa hambatan. Bahkan, tidak hanya ada hal-hal yang mendukung kegiatan tersebut, namun ada juga hal-hal yang menghambat kelancaran pelaksanaannya. Menyikapi hal ini dibutuhkan pemikiran dan tindakan yang cerdas. Artinya, memaksimalkan faktor pendukung yang ditimbulkan sehingga dapat mendukung kelancaran kegiatan dengan sebaik-baiknya, sekaligus meminimalisir faktor penghambat agar tidak menghambat atau menggajal kelancaran kegiatan tersebut. Demikian pula halnya dengan faktor pendukung dan penghambat dalam proses dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat.

Salah satu faktor yang membantu tercapainya tujuan kegiatan pemberdayaan masyarakat sangat dipengaruhi oleh jenis pendekatan yang digunakan dalam melakukan kegiatan tersebut. Dengan demikian, kelompok sasaran kegiatan pemberdayaan dapat terbuka terhadap berbagai bentuk elemen inovasi yang berbeda sesuai dengan pendekatan yang digunakan dalam melakukan kegiatan pemberdayaan. Semua ini bertujuan untuk mengeluarkan kita dari berbagai bentuk resesi, isolasi sosial, resesi dan resesi. berbagai sektor masyarakat. Oleh karena itu, untuk memilih

⁴⁰ Achmad Saeful, Sri Ramdhayanti, *Konsep Pemberdayaan Masyarakat dalam Islam*, Syar'ie, Vol.3, 2020, h. 11-12.

pendekatan yang kita anggap sesuai dengan kondisi sosial ekonomi dan budaya kelompok sasaran, pada dasarnya kita harus mempertimbangkan beberapa hal, seperti:⁴¹

Pertama Kegiatan harus direncanakan. Hal ini karena program memiliki jangka waktu tertentu dan terbuka untuk umum, seperti instansi pemerintah, aktivis LSM, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, dan kelompok masyarakat lain yang dianggap memberikan kontribusi signifikan terhadap upaya pemberdayaan. Artinya, berbagai elemen harus dilibatkan.

Kedua, Pendekatan yang digunakan sebaiknya dalam bentuk kelompok, bukan perorangan. Alasannya, melalui pendekatan kelompok, kegiatan yang dilakukan dapat dilakukan dengan lebih efisien dan efektif, sehingga memberikan hasil yang optimal dibandingkan dengan kegiatan yang dilakukan secara perorangan. Tujuan utamanya adalah untuk kepentingan seluruh masyarakat dan bukan hanya satu rumah tangga saja.

Ketiga, Melibatkan masyarakat secara aktif, terutama kelompok sasaran dalam kegiatan pemberdayaan. Hal ini sangat penting mengingat partisipasi aktif secara langsung memberikan manfaat bagi masyarakat dan memungkinkan mereka untuk bekerja sambil belajar mempraktekkan berbagai konsep dan program yang ditawarkan oleh fasilitator.

Keempat, Tujuan harus jelas dan terarah. Artinya, setiap agenda aksi yang ditawarkan kepada kelompok sasaran memiliki tujuan yang jelas. Termasuk manfaat

⁴¹ Erni Maulani, *Peran Pemerintah Kelurahan Dalam Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Pada Bidang Kesehatan di Kelurahan Cijawura Kota Bandung*, Jurnal Identitas

yang diperoleh dari kegiatan tersebut, terutama yang berkaitan langsung dengan masalah pemenuhan kebutuhan manusia.

Kelima, Kegiatan penguatan masyarakat membutuhkan pendanaan yang memadai. Diketahui bahwa program yang dirancang dengan cara ini, tidak peduli seberapa baik dirancang, akan sulit dilaksanakan tanpa dana yang memadai. Selain itu, masalah pengamanan infrastruktur, termasuk materi pendidikan yang diperlukan, dan kekurangan tenaga terampil tidak dapat diselesaikan tanpa dukungan sektor keuangan yang memadai.

Keenam, Masalah faktor budaya pada kelompok sasaran juga harus diperhatikan secara serius. Persoalannya, seperti yang kita pelajari dari berbagai pengalaman masa lalu, munculnya resistensi dari masyarakat justru disebabkan oleh terlalu kuatnya sikap tradisi dan kepercayaan masyarakat yang tidak sesuai dengan unsur-unsur dan inovasi tersebut. menunjukkan bahwa itu dianggap tidak kompatibel. Alhasil, upaya para moderator untuk membawa perubahan sikap dan perilaku masyarakat tidak membuahkan hasil yang maksimal. Akhirnya, pendekatan yang digunakan harus menarik dan tidak konsisten. Hal ini memastikan bahwa kelompok sasaran secara sukarela menerima program yang ditawarkan tanpa merasakan tekanan eksternal dan proses kegiatan pemberdayaan masyarakat berlangsung dalam suasana.

Faktor kunci yang mempengaruhi keberhasilan pemberdayaan masyarakat adalah perilaku birokrasi pemerintah, dukungan birokrasi pemerintah daerah, peran birokrat pemerintah daerah dalam pembangunan sosial, tingkat pendidikan masyarakat, dan akses masyarakat terhadap informasi program. Salah satu faktor yang memungkinkan pemberdayaan masyarakat adalah partisipasi masyarakat.

Melibatkan atau bahkan mengimplementasikan masyarakat pendukung atau kelompok sasaran (*target group*) secara bersamaan dapat meningkatkan kekuatan masyarakat sehingga proses pemberdayaan dapat dilaksanakan dengan lebih baik. Berpartisipasi dalam sebuah komunitas berarti komunitas tersebut telah memiliki kemampuan dan kepercayaan diri untuk berpartisipasi dan mempengaruhi kehidupan komunitas itu sendiri. Selain itu, berpartisipasi dalam proses pemberdayaan merupakan faktor yang sangat penting. Hal ini dikarenakan program dan kegiatan yang melibatkan masyarakat memiliki beberapa kelebihan dan kekurangan dibandingkan dengan program dan kegiatan yang tidak melibatkan masyarakat.

Pemberdayaan masyarakat merupakan proses yang berkelanjutan, namun praktiknya menunjukkan bahwa tidak semua yang direncanakan berjalan dengan mulus. Terkadang, meskipun tidak jarang, ada kelompok masyarakat yang menolak inovasi dan pembaruan yang dilakukan.

Beberapa hambatan yang dapat menghambat terjadinya perubahan tentunya juga terkait dengan hambatan peningkatan upaya melalui intervensi masyarakat, adalah:

1. Kendala yang berasal dari kepribadian individu, yaitu kestabilan (*homeostatis*), kebiasaan (*habit*), hal yang utama (*primacy*), seleksi persepsi dan ingatan (*selective perception and retention*), ketergantungan (*dependency*), ego yang tinggi (*super ego*), rasa tidak percaya diri (*self-distrust*), dan rasa tidak aman dan regresi (*insecurity and regression*), dan
2. Kendala yang berasal dari sistem sosial, yaitu : kesepakatan terhadap norma tertentu (*conformity to norms*), kesatuan dan kepaduan sistem dan

budaya (*systemic and cultural coherence*), kelompok kepentingan (*vested interest*), hal yang bersifat sakral (*the sacrosanct*), dan penolakan terhadap "orang luar" (*rejection of "outsiders"*).

Faktor penghambat pemberdayaan adalah masalah struktural yang diatasi oleh masyarakat miskin untuk kepentingan pribadi aparatur desa dan strata yang lebih berkuasa. Selain itu, mekanisme pengawasan, pengawasan dan evaluasi serta koordinasi antar lembaga tidak berjalan sebagaimana mestinya.

Lebih lanjut Moeljarto mengalakan bahwa hambatan-hambatan dari pemberdayaan berdasarkan 2 (dua) dimensi dari daya (power), yaitu: dari dimensi distributif, dan dari dimensi generatif. Meskipun mengalirnya daya ini merupakan faktor yang penting dalam mewujudkan pemberdayaan, tetapi implementasinya justru tidak semudah yang diperkirakan serta mengandung banyak hambatan. Hal tersebut berkaitan dengan 2 (dua) dimensi dari daya (power) itu, yaitu : dimensi distributif yang menghambat pemberdayaan, dan dimensi generatif yang cenderung mendukung pemberdayaan. Bila daya ditinjau dalam dimensi distributif maka ia bersifat zero sum (berkurangnya suatu daya dari orang/pihak yang memberikan daya kepada orang/pihak lain) dan sangat kompetitif. Kalau yang satu mempunyai daya, maka yang lain kehilangan. Dalam hubungan daya seperti ini, aktor yang berperilaku rasional dianggap tidak mungkin bekerja sama, karena hanya akan merugikan diri sendiri.

Paling tidak ada 3 (tiga) faktor yang dapat mendukung kelancaran proses pemberdayaan masyarakat, yaitu: (1) partisipasi masyarakat,(2) tingkat pendidikan masyarakat, dan (3) adanya dukungan dari birokrasi pemerinrahan lokal. Adapun

penghambat proses pemberdayaan masyarakat paling tidak ada 4 (empat) faktor, yaitu: (1) masalah structural, (2) keterisolasian masyarakat secara geografis, (3) norma yang bersifat negatif, dan (4) persepsi yang terbentuk di masyarakat.



D. Kerangka Pikir



Gambar 1. Bagan Kerangka Pikir

BAB III

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metodologi yang terkait dengan Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah IAIN Parepare Tahun 2020. Metodologi penelitian dalam buku ini mencakup beberapa penelitian: pendekatan dan jenis penelitian, lokasi dan waktu penelitian, fokus penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan dan pengolahan data, pengujian keabsahan data, dan Meliputi teknik analisis data.⁴²

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini tergolong penelitian lapangan berdasarkan objek penelitiannya. Penelitian ini adalah jenis studi yang menyelidiki peristiwa konkret di lapangan. Berkaitan dengan hal tersebut, penelitian ini tergolong penelitian deskriptif kualitatif. Ini adalah jenis penelitian yang berusaha mendeskripsikan, merekam, menganalisis, dan menafsirkan fakta yang ditemukan melalui pengamatan, wawancara, dan dokumen penelitian.⁴³

Tentang metode penelitian kualitatif, Creswell mendefinisikannya Sebagai pendekatan atau upaya untuk menggali dan memahami suatu fenomena sentral. Untuk memahami gejala inti ini, peneliti mewawancarai partisipan atau peserta studi dan mengajukan pertanyaan umum dan cukup luas kepada mereka. Informasi biasanya berupa kata-kata atau teks. Data berupa kata-kata atau teks kemudian dianalisis. Hasil analisis dapat berupa eksplanasi atau penjelasan, atau berupa tema. Dari data tersebut,

⁴² Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah IAIN Parepare*, (Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press), 2020, h. 22-23.

⁴³ Mardalis, *Metode Penelitian: Suatu Pendekatan ProposalCet. VII*(Jakarta: Bumi Aksara, 2014), h. 26.

peneliti melakukan interpretasi dan menangkap makna yang terdalam. Para peneliti kemudian melakukan refleksi pribadi (introspeksi) dan membandingkannya dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh ilmuwan lain. Hasil akhir penelitian kualitatif dicatat dalam bentuk laporan tertulis. Laporan agak fleksibel karena tidak ada aturan baku untuk struktur dan format laporan penelitian kualitatif. Hasil penelitian kualitatif tentunya sangat dipengaruhi oleh pandangan, pemikiran dan pengetahuan peneliti sebagai data yang diinterpretasikan oleh peneliti. Oleh karena itu, beberapa percaya bahwa peneliti kualitatif agak bias karena peneliti sendiri mempengaruhi analisis data.⁴⁴

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian ini bertempat di Kelurahan Lompoe Kota Parepare sedangkan waktu penelitian diperkirakan satu bulan lebih lamanya.

C. Fokus Penelitian

Penelitian ini mengarah pada kebijakan pemerintah daerah dengan melibatkan masyarakat untuk meningkatkan kualitas layanan.

D. Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan semua informasi yang diperoleh dari responden dan sumber data yang berasal dari dokumen – dokumen baik dalam bentuk statistik maupun dalam bentuk lainnya yang diperlukan guna mendukung penelitian ini.

⁴⁴ Conny R. Semiawan, *Metode Penelitian Kualitatif : Jenis, Karakteristik, dan Keunggulannya*, (Jakarta: PT Grasindo, 2010), h. 6-9.

Adapun sumber data dalam penelitian ini dibagi menjadi dua jenis, yakni sumber data primer dan sumber data sekunder.⁴⁵

1. Data Primer

Data primer adalah data empiris yang berasal langsung dari praktek. Hasil data empiris yang dimaksud adalah hasil wawancara dengan beberapa partisipan atau informan yang menjadi subyek penelitian peneliti. Peneliti mengunjungi informan dan melakukan wawancara untuk mendapatkan hasil atau data yang valid langsung dari informan untuk memudahkan interpretasi temuan. Informan terpilih adalah individu yang benar-benar kompeten dan bersedia memberikan dan memahami data dan informasi, atau yang terlibat langsung dalam pertanyaan penelitian sehingga hasil yang diperoleh relevan dengan kebutuhan penelitian.

a. Proses pengumpulan data langsung di lapangan.

Data primer diperoleh melalui partisipasi aktif peneliti. Data primer biasanya dikumpulkan melalui survei, observasi, eksperimen, kuesioner, wawancara tatap muka, dan media lain yang digunakan untuk mengumpulkan data lapangan.

b. Membutuhkan sumber daya, seperti waktu tenaga, dan biaya yang besar.

Data primer biasanya didapatkan dengan membutuhkan banyak sumber daya yang digunakan, seperti waktu, biaya, dan juga tenaga.

c. Selalu spesifik sesuai kebutuhan peneliti.

⁴⁵ <https://raharja.ac.id/2020/11/09/perbedaan-data-primer-dan-data-sekunder/>

Data primer bersifat spesifik yang disesuaikan dengan kebutuhan peneliti. Data primer ini biasanya dapat mengontrol atau menentukan kualitas penelitian.

- d. Dalam bentuk data mentah.

Data primer merupakan data pertama yang dikumpulkan oleh peneliti melalui kegiatan pengumpulan data secara langsung di lapangan. Untuk alasan inilah, data primer disebut data awal atau mentah..

- e. Lebih valid dan akurat.

Pada data primer biasanya mengacu pada data *real-time* atau data yang terus berkembang setiap waktu.

2. Data Sekunder

- a. Hasil analisis dan interpretasi dari data primer atau data yang berkaitan dengan masa lalu.
- b. Berasal dari peneliti sebelumnya

Data sekunder mungkin telah dikumpulkan sesuai dengan persyaratan identifikasi pemilik. Data sekunder adalah data yang sudah ada sebelumnya yang dikumpulkan oleh lembaga dan organisasi penelitian sebelumnya.

- c. Proses pengumpulan data tidak langsung ke sumbernya.

Proses pengumpulan data sekunder biasanya sederhana dan cepat. Peneliti dapat memperoleh berbagai macam data sekunder menggunakan publikasi pemerintah, situs web, buku, artikel jurnal, catatan internal organisasi, dan banyak lagi.

- d. Sumber daya yang dibutuhkan seperti waktu, tenaga, dan biaya relatif tidak besar, cepat, dan mudah.

Data sekunder cenderung bersifat lebih praktis, murah, dan cepat didapatkan karena bisa diperoleh dari berbagai macam sumber dengan akses yang mudah

- e. Tidak spesifik dan tidak mempunyai kontrol terhadap data karena peneliti merupakan tangan kedua.

Data sekunder tidak spesifik untuk kebutuhan peneliti, serta tidak memiliki kendali untuk menentukan kualitas data.

- f. Sudah berbentuk informasi sudah terjadi pengolahan data.

Data sekunder adalah sekumpulan informasi yang telah ada sebelumnya dan sengaja dikumpulkan oleh peneliti dan digunakan untuk memenuhi kebutuhan data penelitian. Data sekunder ini biasanya tersedia dari buku, publikasi pemerintah, dokumen internal organisasi, laporan, jurnal, dan berbagai situs web yang terkait dengan informasi yang diminta.

- g. Kurang valid dan kurang akurat.

Data sekunder biasanya merupakan data yang berhubungan dengan masa lalu atau lebih bersifat tetap.

E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian karena ditujukan untuk memperoleh data. Metode pengumpulan data yang

digunakan peneliti berhubungan langsung dengan bidang studinya. Dengan kata lain, peneliti melakukan studi lapangan untuk mendapatkan data yang akurat dan terpercaya terkait dengan subjek penelitiannya. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Wawancara (*Interview*)

Wawancara adalah bentuk pengumpulan data yang paling umum digunakan dalam penelitian kualitatif. Peneliti sering menemukan wawancara mudah karena mereka sering berkomunikasi dengan klien mereka untuk informasi penting dalam kehidupan sehari-hari mereka. Kenyataannya tidak sesederhana itu. Banyak peneliti kesulitan mewawancarai orang karena mereka cenderung memberikan jawaban singkat. Juga, budaya masyarakat Indonesia tidak terbiasa mengekspresikan emosi.

Wawancara dalam penelitian kualitatif sedikit berbeda dengan wawancara lainnya, seperti onboarding karyawan baru, onboarding mahasiswa baru, dan bahkan wawancara untuk penelitian kuantitatif. Wawancara dalam penelitian kualitatif adalah percakapan yang bertujuan, didahului dengan beberapa pertanyaan informal. Wawancara penelitian lebih dari sekadar percakapan, bisa berkisar dari informal hingga formal. Setiap percakapan memiliki aturan atau kontrol tertentu oleh peserta tertentu, tetapi dalam wawancara investigatif aturannya lebih ketat. Tidak seperti percakapan biasa, wawancara investigatif adalah untuk menerima informasi dari satu sisi, sehingga hubungan asimetris harus terjadi. Peneliti cenderung melakukan wawancara untuk menemukan perasaan, persepsi, dan pikiran partisipan.⁴⁶

⁴⁶ Imami Nur Rachmawati, *Pengumpulan Data Dalam Penelitian Kualitatif: Wawancara*, Jurnal Keperawatan Indonesia, Vol.11, No.1, h. 35.

2. Pengamatan (*Observasi*)

Observasi diperlukan untuk mendapatkan data berupa dokumen, baik mengenai perilaku pedagogik maupun sarana dan prasarana. Dalam setiap observasi, data yang diperoleh peneliti akan dikaitkan dengan dua hal yang penting, yakni informasi (misalnya bagaimana cara meneliti, sesuai atau tidak alat yang digunakan dan apa yang terjadi dan konteks (hal-hal yang berkaitan di sekitarnya). Hal ini karena segala sesuatu terjadi dalam dimensi waktu dan tempat tertentu, sehingga apabila informasi lepas dari konteksnya maka informasi tersebut akan kehilangan maknanya.⁴⁷

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah pengumpulan data-data diperoleh dari dokumen-dokumen dan pustaka sebagai bahan analisis dalam penelitian ini. Metode ini merupakan suatu cara pengumpulan data yang menghasilkan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, sehingga akan diperoleh data yang lengkap, sah dan bukan berdasarkan perkiraan. Metode ini hanya mengambil data yang sudah ada seperti indeks prestasi, jumlah anak, pendapatan, luas tanah, jumlah penduduk dan sebagainya.⁴⁸

Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi, dimana ketiga metode ini dilakukan secara langsung di lokasi. Dimana teknik observasi dilakukan secara terencana dan sistematis dan wawancara dilakukan dengan cara ikut turun langsung kepada subjek yang ingin diteliti dan yang terakhir

⁴⁷ M Dasim Sarnawi, *Jurnal, Implementasi Pendidikan Karakter Dalam Pembelajaran Sains Di Sekolah Dasar*, Universitas Pendidikan Indonesia, 2012, h.90.

⁴⁸ Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008) h.

teknik dokumentasi suatu cara pengumpulan data yang menghasilkan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang ingin diteliti di kelurahan Lompoe Kota Parepare.

F. Uji Keabsahan Data

Keabsahan data ialah data yang tidak berbeda antara data yang diperoleh peneliti dengan data yang terjadi sesungguhnya pada objek penelitian sehingga keabsahan data yang disajikan dapat dipertanggungjawabkan.⁴⁹ Untuk menghindari kesalahan dalam pengambilan data, maka keabsahan data perlu diuji dengan beberapa cara sebagai berikut :

1. Pengumpulan data secara terus menerus pada subyek penelitian.
2. Triangulasi sumber lain yang dapat dipertanggung jawabkan.
3. Pengecekan oleh subyek penelitian.

G. Teknik Analisis Data

Analisis data penelitian kualitatif menuntut peneliti untuk menelaah dan memahami hubungan dan konsep yang dikembangkan dan dievaluasi. Analisis dalam semua jenis penelitian adalah cara berpikir. Ini mengacu pada studi sistematis tentang sesuatu untuk menentukan bagian-bagiannya, hubungan antara bagian-bagian itu, dan keseluruhannya.

Dari perspektif lain, analisis data kualitatif adalah proses menemukan dan menyusun data secara sistematis dari wawancara, catatan lapangan, dan materi

⁴⁹Muhammad Kamal Zubair, dkk, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah IAIN Parepare Tahun 2020*, (Parepare : IAIN Parepare Nusantara Press, 2020), h.23

lainnya sehingga Anda dapat dengan mudah memahami dan berbagi hasilnya dengan orang lain.

Berdasarkan beberapa pendapat di atas, analisis data kualitatif meliputi pencarian data, perolehan data dari wawancara, catatan lapangan, dan dokumen, pengorganisasian data ke dalam kategori, pendeskripsian ke dalam unit-unit, dan sintesis dapat disimpulkan menjadi proses editing yang sistematis. dengan menyusun Pola yang diakhiri dengan kesimpulan agar mudah dipahami oleh Anda dan orang lain.⁵⁰

Dalam penelitian ini, teknik analisis deduktif digunakan. Artinya, data yang diperoleh di lapangan pada umumnya dideskripsikan dengan istilah-istilah yang menarik kesimpulan tertentu. Menurut Miles dan Huberman ada tiga metode dalam analisis data kualitatif, yaitu reduksi data, model data, dan penarikan/verifikasi kesimpulan.

1. Reduksi Data

Reduksi data adalah proses pemilihan, pemusatan, abstraksi, dan transformasi data mentah dari field. Dalam proses reduksi ini, peneliti mencari data yang benar-benar valid dan akurat. Reduksi data tidak terpisah dari analitik. Itu adalah bagian dari analisis, dan memilih data apa yang akan dikodekan dan diekstraksi oleh peneliti, meringkas pola rangkaian pemotongan, atau mendongeng, semuanya adalah keputusan analitis. Reduksi data adalah suatu bentuk analisis yang menyaring, memilih, memusatkan, membuang, dan mengorganisasikan data sehingga dapat ditarik kesimpulan yang pasti.

⁵⁰ Sirajuddin Saleh, *Analisis Data Kualitatif*, (Makassar: Pustaka Ramadhan, 2017, h. 75-76

2. Model Data/Penyajian Data

Presentasi data adalah kumpulan informasi terstruktur yang menarik kesimpulan dan memberikan kesempatan untuk mengambil tindakan. Bentuk representasi meliputi teks naratif, matriks, grafik, kisi-kisi, dan bagan. Tujuannya agar lebih mudah dibaca dan ditarik kesimpulan. Oleh karena itu penyajiannya harus terorganisasi dengan baik.

Teks umumnya tersebar dari satu bagian ke bagian lain dan tidak tertata dengan baik. Dalam keadaan seperti ini, mudah bagi seorang peneliti untuk membuat kesalahan, bertindak sembarangan, atau bertindak sangat tergesa-gesa untuk mencapai kesimpulan yang adil, sepotong-sepotong, dan tidak berdasar. Kecenderungan kognitif adalah menyederhanakan informasi yang kompleks. menjadi bentuk atau struktur yang disederhanakan, selektif, seragam, dan mudah dipahami.⁵¹

Peneliti berikutnya dapat menarik kesimpulan yang masuk akal dan melanjutkan ke tingkat analisis berikutnya. Seperti reduksi data, membangun dan menggunakan model tidak terpisah dari analitik. Merancang kolom dan baris matriks data kualitatif dan memutuskan data mana yang akan dimasukkan dalam sel mana dalam format yang sama adalah kegiatan analitis.⁵²

3. Penarikan Kesimpulan/Verifikasi Kesimpulan

Peneliti berikutnya dapat menarik kesimpulan yang masuk akal dan melanjutkan ke tingkat analisis berikutnya. Seperti reduksi data, membangun dan menggunakan model tidak terpisah dari analitik. Merancang kolom dan baris matriks

⁵¹Hamid Patilima, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung : CV Alfabeta, 2011), h. 101.

⁵²Emzir, *Analisis data : Metodologi Penelitian Kualitatif*, h. 132.

data kualitatif dan memutuskan data mana yang akan dimasukkan dalam sel mana dalam format yang sama adalah kegiatan analitis.

Kesimpulan "akhir" mungkin tidak ditarik sampai pengumpulan data selesai, tergantung pada ukuran korpus catatan lapangan, metode pengkodean, penyimpanan, dan penyempurnaan yang digunakan, pengalaman peneliti, dan kebutuhan penyandang dana. Namun, dalam banyak kasus, kesimpulan dapat dikatakan diproses secara induktif oleh seorang peneliti. Menarik kesimpulan hanyalah bagian dari kegiatan dari keseluruhan komposisi. Kesimpulan juga diperiksa selama penyelidikan. Makna yang diperoleh dari data harus selalu diperiksa keakuratan dan validitasnya untuk memastikan validitasnya.⁵³

⁵³Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, h. 210

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini penulis akan menguraikan hasil penelitian dan menyajikan data yang didapatkan penulis setelah melakukan penelitian di Kelurahan Lompoe Kota Parepare melalui wawancara, observasi, serta dokumentasi yang disertai dengan penjelasan – penjelasan untuk mempermudah dalam melakukan proses pembahasan hasil penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Peran Pemerintah Daerah dalam Pemberdayaan Layanan Kesehatan Masyarakat di Kelurahan Lompoe Kota Parepare dan menguraikan prinsip sukses dalam Pemberdayaan Layanan Kesehatan Masyarakat Di Kelurahan Lompoe Kota Parepare.

A. Prinsip Sukses dalam Pemberdayaan Layanan Kesehatan Masyarakat di Kelurahan Lompoe Kota Parepare

Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2018 tentang Kecamatan bahwa “Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari daerah kabupaten/kota yang dipimpin oleh camat, disebutkan kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah kabupaten atau daerah kota dibawah kecamatan”. Berdasarkan pasal 27 kedudukan kelurahan dan tugas lurah :

1. Kelurahan sebagai perangkat kecamatan yang mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kelurahan yang dipimpin lurah.

2. Selain melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), lurah dibantu oleh perangkat kelurahan untuk melaksanakan tugas yang diberikan oleh camat.
3. Tugas lurah meliputi:
 - a. Pelaksanaan kegiatan pemerintahan kelurahan;
 - b. Pelaksanaan pemberdayaan masyarakat;
 - c. Pelaksanaan pelayanan masyarakat;
 - d. Pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum;
 - e. Pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
 - f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh camat dan
 - g. Pelaksanaan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.

Pemerintah Kelurahan merupakan faktor kunci keberhasilan program pemberdayaan masyarakat di wilayah Kelurahan. Oleh karena itu, keberhasilan program di Kelurahan tergantung pada besarnya peran pemerintah Kelurahan dalam menjalankan tugas dan fungsinya di wilayah kerjanya masing-masing, karena Lurah beserta jajarannya bertugas menggerakkan roda pemerintahan. Melakukan Peran mereka dalam mempengaruhi masyarakat untuk berpartisipasi dalam program pemberdayaan masyarakat.

Salah satu aspek kunci dalam proses pemberdayaan masyarakat adalah persoalan prinsip-prinsip pemberdayaan yang berkaitan dengan isu kebijakan. Ini dapat digunakan sebagai panduan untuk latihan pemberdayaan yang holistik dan komprehensif. Ada beberapa prinsip pemberdayaan yang dikemukakan oleh Mardikanto yang dapat digunakan untuk mensukseskan program pemberdayaan.:⁵⁴

1. Pemberdayaan yang sukses sangat bergantung pada kejelasan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Yaitu dengan menggunakan metode yang tepat guna, menyesuaikan kondisi sosial kelompok sasaran kegiatan pemberdayaan sehingga metode tersebut tidak hanya efisien dan efektif, tetapi juga berdaya guna dan berhasil guna.
2. Motivasi dan partisipasi dalam layanan pemberdayaan tergantung pada sejauh mana masyarakat diberikan kesempatan untuk mengembangkan tujuan program dan memilih mereka yang terlibat di lapangan.
3. Perpaduan pemanfaatan pengetahuan dan informasi di dalam dan di luar masyarakat diyakini dapat meningkatkan efek pemberdayaan seperti: Terlaksananya kegiatan sosialisasi tentang pentingnya pemeliharaan kesehatan di masyarakat.

Peran pemerintah kelurahan dalam pemberdayaan masyarakat dalam bidang kesehatan dapat dilihat dari 3 (tiga) aspek menurut Soekanto, yaitu:⁵⁵

⁵⁴ Andi Haris, *Memahami Pendekatan Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pemanfaatan Media*, Jupiter Vol. XIII No.2, 2014, h. 53-54.

⁵⁵ Erdin Maulain dkk., *Peran Pemerintah Kelurahan Dalam Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Pada Bidang Kesehatan Di Kelurahan Cijawura Kota Bandung*, jurnal identitas.

- a. Peran Aktif, dimana dalam hal ini Pemerintah Kelurahan Lompoe bisa dikatakan cukup aktif dalam menyediakan layanan kesehatan untuk masyarakatnya. Seperti penyediaan pelayanan kesehatan gratis dan juga posyandu untuk balita dan ibu hamil, juga menyediakan pil KB dan makanan untuk balita dan ibu hamil.
- b. Peran Partisipasi, Pemerintah Kelurahan Lompoe ikut langsung berpartisipasi bersama masyarakat jika ada pelayanan kesehatan. Seperti ikut langsung dalam kegiatan pemeriksaan gratis agar masyarakat juga mau berpartisipasi bersama pemerintah kelurahan.

Peran masyarakat adalah melibatkan individu, keluarga dan kelompok masyarakat dalam segala upaya peningkatan kesehatan, serta menjadi tanggung jawab kesehatan diri, keluarga dan masyarakat. Peran masyarakat adalah proses untuk:

1. Menumbuhkan dan meningkatkan rasa tanggung jawab.
2. Mengembangkan kemampuan untuk bisa menyadari akan pentingnya kesehatan.

Peran masyarakat dalam bidang kesehatan adalah suatu keadaan dimana individu, keluarga dan masyarakat umum bertanggung jawab atas kesehatan dirinya sendiri, keluarganya, atau lingkungannya.⁵⁶

⁵⁶ Dwi Iriani Margayaningsih, *Peran Masyarakat dalam Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Desa*, h. 76-77.

Kelurahan Lompoe memiliki berbagai macam program pemberdayaan layanan kesehatan masyarakat. Program pemberdayaan yang dikerjakan bermuara pada upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Program pemberdayaan layanan kesehatan yang ada di Kelurahan Lompoe mencakup penyediaan layanan pemeriksaan kesehatan gratis yang tiap bulannya disetiap rt/rw berbeda yang ada di wilayah Kelurahan Lompoe Kota Parepare.

Hal ini berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Kepala seksi pelayanan umum dan pemberdayaan masyarakat Rosdiana, S.E. yang mengatakan bahwa:

Berbagai upaya telah dilakukan dalam rangka memberikan pelayanan kesehatan masyarakat seperti pemberian layanan pemeriksaan kesehatan gratis yang kami sediakan tiap bulannya di setiap rt/rw yang berbeda di wilayah Kelurahan Lompoe Kota Parepare.

Upaya Pemerintah Kelurahan Lompoe dalam rangka pemberdayaan layanan kesehatan masyarakat, yaitu dengan Menyediakan fasilitas kesehatan yang memadai, melaksanakan berbagai program kesehatan seperti pemeriksaan kesehatan gratis setiap bulan, melaksanakan Poshandu yang banyak ditawarkan kepada masyarakat, melakukan konsultasi KB dan berkoordinasi dengan pemerintah kota. , melakukan pendataan untuk pelayanan kesehatan masyarakat kurang mampu, serta memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam menggunakan fasilitas yang ada sehingga seluruh masyarakat dapat menerima dan merasakan program tersebut.

Tersedianya layanan kesehatan dari Kelurahan Lompoe Kota Parepare kiranya dapat membantu masyarakat seperti lansia untuk memeriksakan kesehatannya dan

masyarakat merasa terbantu dengan adanya pelayanan tersebut. Hal ini di sampaikan oleh Ibu Kepala seksi pelayanan umum dan pemberdayaan masyarakat Rosdiana, S.E. mengatakan bahwa :

Masyarakat sangat antusias sekali ingin mengetahui kondisi kesehatannya. Walaupun sebelumnya ada yang takut untuk diperiksa darahnya, tapi hal ini dapat diselesaikan dengan cara diberikan penjelasan serta dukungan kader kesehatan.⁵⁷

Wujud dari upaya pemerintah kelurahan lompoe dalam rangka pemberdayaan layanan kesehatan masyarakat yaitu dengan tersedianya fasilitas kesehatan yang memadai maka seluruh masyarakat dapat mendapatkan layanan kesehatan yang berkualitas, masyarakat juga memiliki hak yang sama dalam memperoleh kesehatan, dan masyarakat memahami pola hidup sehat. Seperti yang disampaikan dari hasil wawancara oleh salah satu warga Kelurahan Lompoe Kota Parepare yaitu Ibu Darmiah yang mengatakan bahwa:

Saya merasa senang dengan adanya pemeriksaan gratis seperti ini, karena pengetahuan saya dan masyarakat lainnya bertambah dan menjadi sadar akan pentingnya hidup sehat.⁵⁸

Hal yang sama juga disampaikan oleh Ibu Isana juga salah satu masyarakat Kelurahan Lompoe Kota Parepare mengatakan bahwa:

⁵⁷ Rosdiana, Kepala Seksi Pelayanan Umum Dan Pemberdayaan Masyarakat, Kel. Lompoe, Kec. Bacukiki, Kota Parepare, Sulsel, wawancara di Kota Parepare, 26 Agustus 2022.

⁵⁸ Darmiah, Masyarakat, Kel. Lompoe, Kec. Bacukiki, Kota Parepare, Sulsel, wawancara di Kota Parepare, 26 Agustus 2022.

Karena adanya pemeriksaan gratis ini jadi saya tidak lagi pusing kalau mau memeriksa kesehatan saya, karena setiap bulannya akan ada disetiap rt/rw dan gratis juga disediakan obatnya juga.⁵⁹

Berdasarkan hasil wawancara diatas bahwa meskipun Pemerintah Kelurahan Lompoe telah menerapkan pelayanan kesehatan untuk kepentingan masyarakat namun tidak dapat dipungkiri bahwa masih ada masyarakat yang sulit untuk menjangkau pelayanan kesehatan yang ada seperti kurangnya informasi yang didapat dan kurangnya pengetahuan tentang pentingnya kesehatan dalam masyarakat.

Prinsip keberhasilan pelaksanaan proses dan pencapaian tujuan dicapai melalui penerapan pendekatan dan strategi pemberdayaan dalam pemberdayaan masyarakat.

Pendekatan yang dapat digunakan dalam pemberdayaan masyarakat yaitu:

a. Pendekatan Partisipatif

Pendekatan partisipatif dipandu oleh pendekatan yang memungkinkan masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam pengembangan sadar kontribusi pribadi mereka sehingga kebutuhan mereka dapat dipenuhi melalui pengetahuan dan keterampilan.

b. Pendekatan Kesejahteraan

Pendekatan kesejahteraan merupakan pendekatan pemberdayaan masyarakat dengan memperhatikan berbagai prakarsa yang dilaksanakan dengan kepentingan masyarakat di pusat. Oleh karena itu, dalam pendekatan ini, masyarakat menjadi indikator kunci pemberdayaan.

⁵⁹ Isana, Masyarakat, Kel. Lompoe, Kec. Bacukiki, Kota Parepare, Sulsel, wawancara di Kota Parepare, 26 Agustus 2022.

Masalah pemilihan pendekatan yang dianggap tepat untuk melakukan kegiatan pemberdayaan masyarakat adalah mereka yang terlibat dalam kegiatan pemberdayaan ini menggunakan pendekatan yang kurang tepat, tidak tepat, dan tidak konsisten secara sosial. Mengingat itu, itu pasti salah satu hal yang harus dipertimbangkan dengan serius. Situasi ekonomi masyarakat penerima manfaat. (Klien) tidak hanya menimbulkan kerugian materi, tetapi memakan waktu, tetapi kegiatan tersebut juga tidak memberikan hasil yang diinginkan dan optimal. Selain itu, kelompok sasaran kegiatan pemberdayaan memiliki latar belakang sosial ekonomi dan budaya yang berbeda, sehingga pendekatan yang digunakan tentunya harus disesuaikan dengan keterampilan, persepsi, perilaku dan budaya masyarakat. Oleh sebab itu, sebelum memulai kegiatan pemberdayaan, termasuk merancang agenda program kegiatan yang ingin kami presentasikan kepada masyarakat, kami melakukan penelitian eksplorasi untuk menilai konteks dan kondisi sosial, ekonomi dan budaya lokal yang akan diselidiki. Tentu lebih baik untuk masyarakat..

Selain itu, pendekatan yang digunakan harus mampu membangkitkan semangat dan motivasi para penerima manfaat. Ini akan memungkinkan kami untuk mengelola elemen inovasi dan bentuk dukungan lainnya dengan cara terbaik, dan kami berharap akan terjadi perubahan yang berkelanjutan dan komprehensif. Sisi kehidupan manusia yang lebih baik. Itu pasti benar, dan harus kita akui bahwa pendekatan yang digunakan perlu lebih luas cakupannya, dengan mempertimbangkan berbagai perspektif masyarakat. Dengan cara ini, tugas-tugas yang sangat kompleks dan sulit dengan kebutuhan mengantisipasi kemungkinan penolakan dapat ditemui di seluruh masyarakat. Oleh karena itu, diawali dengan beberapa pendekatan pemberdayaan masyarakat yang ada, dan dengan mempertimbangkan beberapa hal

yang perlu diperhatikan sebelum menggunakan suatu pendekatan, maka kami menyimpulkan pendekatan pemberdayaan masyarakat yang dianggap tepat dan layak untuk dilaksanakan dapat diturunkan persyaratan diantaranya:⁶⁰

1. Mudah dipahami dan dimengerti dikalangan kelompok penerima manfaat.
2. Pendekatan itu dinilai lebih efisien dan efektif dalam arti memiliki model yang sederhana namun bisa memberi manfaat yang maksimal bagi masyarakat
3. Melibatkan fasilitator yang memiliki keahlian serta keterampilan dibidangnya sehingga mereka mampu bekerja secara profesional.
4. Sekalipun pendekatan ini membawa perubahan pada masyarakat, budaya lokal merupakan faktor yang menjaga solidaritas sosial antar sesama warga, karena tidak semua yang menjadi sasaran kegiatan pemberdayaan memiliki nilai yang sama. tidak berarti menghilangkan sama sekali nilai-nilai sosial. Ada kemungkinan, jadi pendekatan yang Anda gunakan harus bisa mengakomodasi format yang berbeda. Mengatasi kekurangan yang dimiliki masyarakat, secara meyakinkan melampaui keterbatasan yang dimiliki individu-individu ini, dan membebaskan diri dari perangkat kemunduran, kemiskinan, dan keterbelakangan.
5. Penerapan pendekatan pemberdayaan masyarakat harus dilakukan secara terencana, terukur, menyeluruh, progresif, berkelanjutan dan tepat sasaran. Hal ini memastikan bahwa semua elemen kelompok penerima diberdayakan

⁶⁰ Andi Haris, *Memahami Pendekatan Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pemanfaatan Media*, Jupiter Vol. XIII No.2, 2014, hal. 58

sepenuhnya dan mereka yang berkontribusi terhadap keberhasilannya tidak merasa didiskriminasi dalam kegiatan.

6. Dalam pendekatan percepatan terwujudnya masyarakat mandiri ini, prinsip-prinsip seperti transparansi, akuntabilitas, daya tanggap, dan keadilan merupakan bagian integral dari proses kegiatan pemberdayaan masyarakat.

B. Peranan Pemerintah Daerah dalam Pemberdayaan Layanan Kesehatan Masyarakat di Kelurahan Lompoe Kota Parepare Menurut Al – Dharuriyah Al - Khamsah

Pada dasarnya setiap orang ingin menjalani dan menjalani hidup yang sehat, tenang, damai dan bahagia, namun keinginan dan keinginan tersebut tidak selalu terpenuhi. Islam sebagai agama sangat memperhatikan eksistensi manusia sehingga menghadirkan konsep hidup sehat.⁶¹

Al – Dharuriyah Al – Khamsah dalam kaitannya dengan pemberdayaan layanan kesehatan masyarakat memiliki posisi yang penting karena memberikan penjelasan mengenai kesehatan umat. Dikenal ada lima kebutuhan asasi (*dharuriyat al-khamsah*) yang harus diperjuangkan dan dipertahankan, yaitu Memelihara agama (*al-muhafadhah ‘ala ali-din*), Memelihara jiwa (*al-muhafadhah ‘ala al-nafs*), Memelihara akal pikiran (*al muhafadhah ‘ala al-’aql*), Memelihara keturunan (*al-muhafadhah ‘ala al-nasab*), dan Memelihara harta/properti (*al-muhafadhah ‘ala al-mal*). Dari kelima kebutuhan asasi tersebut terdapat diantaranya yang mampu menjelaskan tentang kesehatan dalam masyarakat:⁶²

⁶¹ Achmad Fuadi Husin, *Islam dan Kesehatan*, Islamuna, Vol.1 No. 2, 2014, h. 195.

⁶² <https://rm.id/baca-berita/kolom/32238/antara-kebutuhan-dharuriyat-dan-hijjiyah-2>

1. Memelihara kemaslahatan agama (*al-muhafadhah 'ala ali-din*)

Di dalam komunitas, ada berbagai jenis budaya yang memengaruhi kepercayaan seperti Agama atau Kepercayaan. Karena penduduk Indonesia memiliki suku dan agama yang berbeda-beda. Pemerintah juga menegaskan keyakinan mereka, karena UUD 1945 menyatakan bahwa "setiap warga negara memiliki kebebasan untuk memilih dan menjalankan keyakinannya" dan "menjamin semua kebebasan berkeyakinan" memainkan peran penting dalam mengatur kebebasan beragama sesuai dengan agama mereka dan keyakinan." Agama juga berkaitan dengan kesehatan, ada penyakit yang disebabkan oleh virus dan bakteri, namun ada juga penyakit yang disebabkan oleh jiwa dan pikiran. Penyakit ini disebut penyakit hati atau penyakit mental.⁶³

Islam merupakan anugerah yang sangat berharga dan ideal dari Allah SWT. Akibatnya, agama perlu dijaga dari segala sesuatu yang dapat menggangukannya, baik dari dalam maupun dari luar. Dengan demikian, umat Islam diperbolehkan (bahkan diperintahkan) untuk berjihad guna mempertahankan agamanya dari para penyusup, dan sebagainya. Telah diketahui dengan baik bahwa dalam jihad (perang), seseorang tidak dapat menghindari bahaya yang mengancam nyawanya sendiri. Tapi mengorbankan nyawa sendiri atau mengambil nyawa orang lain untuk membela agama sudah merupakan monastisisme. Hal ini menunjukkan bahwa agama merupakan tingkatan tertinggi dari semua kebutuhan dasar manusia.

⁶³ Muziburrahman, *Pendidikan Agama: Ajaran Agama yang Berhubungan dengan Kesehatan*, Banjarbaru, 2015, h.3

2. Memelihara jiwa (*al-muhafadhah 'ala al-nafs*)

Menurut Zakiah Daradjat, tercapainya keselarasan sejati antara fungsi jiwa dan terciptanya penyesuaian diri antara manusia dengan diri sendiri dan lingkungannya atas dasar agama dan takwa untuk membangun dunia yang menyenangkan merupakan kesehatan mental. Tujuannya adalah untuk menjalani kehidupan yang bermakna di akhirat.⁶⁴

Karena itu, keyakinan Islam melarang tindakan seperti pembunuhan, penyiksaan, dan pelanggaran lain yang membahayakan jiwa. Islam akan menjatuhkan hukuman keras, seperti cerita pembunuhan dan penganiayaan, serta ancaman berat bagi mereka yang mencoba bunuh diri, jika larangan ini diterapkan. Tujuan dari segala sesuatu adalah untuk menjaga keberadaan jiwa manusia saat hadir di dunia ini.

3. Memelihara Keturunan (*al-muhafadhah 'ala al-nasab*)

Salah satu tujuan perkawinan antara lain untuk menghasilkan keturunan. Oleh karena itu, perkawinan berfungsi sebagai sarana mengatur interaksi antara laki-laki dan perempuan. Untuk menghasilkan keturunan dan cucu yang akan meneruskan garis keluarga, hal ini dilakukan. Baik masyarakat maupun garis keturunan diakui oleh Allah swt. Namun, Allah tidak akan menghormati garis keturunan atau masyarakat jika pernikahan tidak dihormati. Akibatnya, tidak ada penghormatan terhadap keturunan yang dihasilkan baik secara vertikal (dengan Tuhan) maupun secara horizontal (dengan masyarakat). Dalam konteks ini, Allah

⁶⁴ Susilawati, Skripsi: *Kesehatan Mental Menurut Zakiah Daradjat*, (Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2017), h.7

SWT mengamanatkan agar manusia menikah dan melarang zina dan hubungan seks bebas, yang keduanya dapat mengakibatkan "penyakit seperti HIV/AIDS" dan PMS lainnya. Banyak silsilah ini memiliki makna tidak hanya dalam kehidupan ini tetapi juga dalam kehidupan berikutnya.

Al – Qur'an surat Al - Baqarah ayat 233 merekomendasikan agar ibu dari anak kecil menyusui anaknya secara eksklusif selama dua tahun berturut-turut. Saran tersebut meliputi regulasi kesehatan anak, praktik pengasuhan anak, mendukung generasi muda yang tangguh, dan mendukung sumber daya manusia yang berkualitas. Makanan terbaik untuk bayi adalah ASI karena memberikan semua nutrisi yang mereka butuhkan serta faktor imunologi yang melindungi dari berbagai bakteri.

4. Memelihara akal pikiran (*al muhafadhah 'ala al-'aql*)

perlindungan sepenuh hati. Dalam sistem hukum yang sangat mendasar, hak untuk melindungi ruh diartikan sebagai larangan untuk makan, minum, atau mengkonsumsi apapun yang dapat membahayakan ruh. Itu mendapat hukum yang cukup sulit bagi orang untuk dilanggar (kerusakan pada sistem sensorik). Itu dimaksudkan untuk perlindungan dari roh. Sebenarnya, penjelasan dasar ini dapat dipahami lebih lanjut. Jadi pikiran yang benar juga mencakup hak atas pendidikan dan hak atas kebebasan berekspresi.⁶⁵

Kelima *al - dharuriyyat* tersebut adalah hal yang mutlak harus ada pada diri manusia. Dalam hal ini, beberapa di antaranya terkait dengan kesehatan. Allah memerintahkan manusia untuk ada dan melakukan segala upaya untuk mencapai

⁶⁵ <https://pecihitam.org/dharuriyyat-al-khams/>

kesempurnaan. Di sisi lain, Allah SWT melarang tindakan apa pun yang dapat menghilangkan atau mengurangi salah satu dari lima dariyat tersebut. Tindakan apa pun yang dapat mewujudkan atau melanggengkan lima unsur dasar adalah baik dan karenanya harus dipraktekkan. Sebaliknya, setiap tindakan yang merusak atau mengurangi nilai lima unsur dasar adalah buruk dan harus dihentikan. bukan. Semua itu memiliki manfaat bagi manusia. Dengan tidak adanya salah satu dari mereka, kehidupan manusia terancam oleh masalah jangka panjang yang sangat besar, yang menyebabkan kepunahan.

Mengenai masalah ketertiban, sebagian ulama berpandangan bahwa ketertiban sesuai dengan yang di atas, bahwa perlindungan dan pemenuhan kebutuhan agama lebih diutamakan daripada empat hal berikut, dan bahwa perlindungan kehidupan lebih diutamakan daripada tiga hal berikutnya. meningkatkan. Satu setelah lainnya. Ada pula ulama yang menganggap empat dari lima kebutuhan yang disebutkannya di atas, kebutuhan non-religius, pada tingkatan yang sama. Artinya, masyarakat dapat memilih mana yang akan diprioritaskan dan mana yang harus dipertahankan atau dikorbankan, tergantung pada pertimbangan dan situasi aktual yang mereka hadapi. Dan semua ulama sepakat bahwa perlindungan agama adalah yang terbaik.

Al-Dharuriyah merupakan kebutuhan yang harus dipenuhi agar penduduk permukaan dapat bertahan hidup secara manusiawi. Tanpa salah satu dari mereka, kehidupan manusia akan terancam dan kita akan berada dalam masalah jangka panjang yang besar, yang mengarah pada kepunahan. contoh:

Jika pembunuhan dibiarkan dan nyawa manusia tidak dilindungi, kita tidak bisa hidup damai, kehidupan manusia di muka bumi terancam, dan manusia bisa

saling bunuh karena alasan sepele atau dendam belaka bahkan bisa berujung pada dendam.⁶⁶

Kesehatan merupakan salah satu faktor terpenting dalam kehidupan manusia. Karena dalam keadaan sehat orang nyaman beraktivitas dan bisa berbuat banyak dengan memberi manfaat bagi orang lain. Manusia adalah makhluk kompleks yang terdiri dari komponen “fisik, psikologis, sosial dan spiritual”. Oleh karenanya itu, jika seseorang kesakitan, maka tentunya harus dilakukan pemeriksaan dan pengobatan secara menyeluruh.⁶⁷



⁶⁶ <https://muklasihaha.blogspot.com/2015/01/dharuriyyat-hajiyat-dan-tahsinayat-asy.html>

⁶⁷ Achmad Fuadi Husin, *Islam dan Kesehatan*, Islamuna, Vol.1 No. 2, 2014, h. 195.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil analisis dan pembahasan untuk menjawab tujuan dari penelitian ini maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Prinsip sukses dalam pemberdayaan layanan kesehatan masyarakat dikelurahan lompoe kota parepare sudah dilaksanakan begitu baik. Tapi tidak dapat dipungkiri bahwa tercapainya prinsip sukses dalam pemberdayaan masyarakat kelurahan masih harus ditingkatkan upaya dan pemaksimalan langkah – langkah yang akan diambil.
2. Pemberdayaan kesehatan masyarakat di Kelurahan Lompoe Kota Parepare sesuai dengan Peraturan Walikota Parepare Nomor 38 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sarana Dan Prasarana Kelurahan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan. Namun dalam penyediaan layanan kesehatan saja tidak cukup jika tidak dilakukan sosialisasi tentang pentingnya kesehatan dalam masyarakat.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis peroleh maka penulis akan memberikan saran-saran kepada pihak-pihak yang terkait, yakni:

1. Untuk pemerintah kelurahan lompoe kota parepare hendaknya terus meningkatkan kinerja agar menyediakan layanan kesehatan kepada masyarakat kelurahan lompoe kota parepare, seperti tetap memberikan

pelayanan kesehatan gratis yang rutin, memberikan sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat agar masyarakat mengerti arti pentingnya kesehatan untuk diri mereka.

2. Untuk semua warga masyarakat kelurahan lompoe kota parepare agar tetap bekerja sama dengan pemerintah yang telah menyediakan pelayanan kesehatan dan turut berpartisipasi dalam setiap pelayanan yang disediakan oleh pemerintah kelurahan lompoe.



DAFTAR PUSTAKA

Al – Qur'an Al - Karim

- Abadi, Said. 2021. *Perlindungan Nasabah Muslim dalam Transaksi Non-Tunai Perseptif Al-Dharuriyah AL-Khamsah*, I-JIEF : Indonesian Journal of Islamic Economics and Finance; Vol.1, No.2.
- Anggie, Merritama. 2019. *“Pemberdayaan Masyarakat Oleh LAZ Harfa Melalui Program Pemicuan STBM Bidang Kesehatan”*, Skripsi, UIN SMH.
- Basrowi dan Suwandi. 2008. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Basrowi dan Suwandi. *Memahami Penelitian Kualitatif*.
- Defri, Achmad Bardjan Saleh, Ignatius Adiwidjaja. 2014. *Upaya Pemerintah Kelurahan dalam Rangka Pemberdayaan Pelayanan Masyarakat*, Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Vol.3 No.2.
- Emzir, Analisis data : Metodologi Penelitian Kualitatif.
- Ghina, Nabiila Yumna. 2017. *“Kampung Iklim: Pengelolaan Lingkungan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat”*, Skripsi, Universitas Sebelas Maret, FISIP Sosiologi.
- Haris, Andi. 2014. *Memahami Pendekatan Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pemanfaatan Media*, Jupiter Vol. XIII No.2.
- Husin, Achmad Fuadi. 2014. *Islam dan Kesehatan*. Islamuna. Vol.1 No. 2.

- L, S., Haq, I., Bedong, M.A.R., NurHamda, Pradana, S.A., Faiz, A.K., dan Pikhulan, R.M. (2021). *How Divorce Mediation Should Be Governed. Journal Of Legal, Ethical And Regulatory Issues.*
- Mardalis. 2014. *Metode Penelitian: Suatu Pendekatan Proposal Cet. VII*(Jakarta: Bumi Aksara.
- Margayaningsih, Dwi Iriani. *Peran Masyarakat dalam Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Desa.*
- Maulain, Erni dkk., *Peran Pemerintah Kelurahan Dalam Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Pada Bidang Kesehatan Di Kelurahan Cijawura Kota Bandung*, Jurnal Identitas.
- Maulani, Erni. *Peran Pemerintah Kelurahan Dalam Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Pada Bidang Kesehatan di Kelurahan Cijawura Kota Bandung.* Jurnal Identitas.
- Moenta, P., dan Pradana, S.A. (2017). *Pokok-pokok Hukum Pemerintahan Daerah.* PT. RajaGrafindo Persada.
- Muziburrahman, 2015.. *Pendidikan Agama: Ajaran Agama yang Berhubungan dengan Kesehatan.* Banjarbaru.
- Noor, Munawar. 2011. *Pemberdayaan Masyarakat*, Jurnal Ilmiah CIVIS, Vol.1 No.2.
- Noor, Munawar. 2011. *Pemberdayaan Masyarakat*, Jurnal Ilmiah CIVIS, Vol.1 No.2.
- Patilima, Hamid. 2011. *Metode Penelitian Kualitatif.* Bandung : CV Alfabeta.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
- Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan

Peraturan Walikota Parepare Nomor 38 Tahun 2019, h. 4

Pradana, S.A., moenta, A.P., Riza, M., dan Hasrul M. (2019). *Counstructing A Legal Consept Of Secndary Education Management In Indonesia*. Journal of law, policy and globalization.

Prasetya, Eska Perdana Abdul Rahman, Fatihah Rahmalia. 2018. *Pemberdayaan Masyarakat Tentang Kesehatan, Pendidikan dan Kreatifitas*, Vol.2 No.1.

Purbasari, Nurul. 2014. "*Pemberdayaan Masyarakat Melalui Kegiatan Daur Ulang Sampah Plastik*", Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah.

Qutb, Sayyid Tafsir Fi Zilalil Qur'an, terj. As'ad Yadin dkk. Jakarta: Gema Insani Press, 2001.

Rachmawati, Imami Nur. *Pengumpulan Data Dalam Penelitian Kualitatif: Wawancara, Jurnal Keperawatan Indonesia*, Vol.11, No.1.

Saeful, Achmad dan Sri Ramdhayanti. 2020. *Konsep Pemberdayaan Masyarakat dalam Islam*, Vol.3.

Saeful, Achmad Sri Ramdhayanti. 2020. *Konsep Pemberdayaan Masyarakat dalam Islam*, Syar'ie, Vol.3.

Saleh, Sirajuddin. 2017. Analisis Data Kualitatif. Makassar: Pustaka Ramadhan.

Sany, Ulfi Putra. 2019. *Prinsip-Prinsip Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Al-Qur'an*, Jurnal Ilmu Dakwah, Vol.39 No.1.

Saputra, Anugrah Rio. 2014. *Kinerja Aparatur Pemerintah Kelurahan Dalam Pelayanan Publik di Kelurahan Pasar Pagi Kecamatan Samarinda Kota*, eJournal Administrasi Negara, Vol.3 No.2.

Sarnawi, M Dasim. 2012. *Implementasi Pendidikan Karakter Dalam Pembelajaran Sains Di Sekolah Dasar*, Universitas Pendidikan Indonesia.

- Semiawan, Conny R. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif : Jenis, Karakteristik, dan Keunggulannya*. Jakarta: PT Grasindo.
- Sugiri, Lasiman. *Peranan Pemerintah Daerah dalam Pemberdayaan Masyarakat*.
- Suharto. 2021. *Keberhasilan Pemerintah Kelurahan dalam Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan di Kota Semarang*, Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum QISTIE Vol.14 No.1.
- Suharto. 2021. *Keberhasilan Pemerintah Kelurahan dalam Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan di Kota Semarang*, Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum QISTIE Vol.14 No.1.
- Suleman, Endang Sutisna dkk. 2012. *Model Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan, Studi Program Desa Siaga*, Jurnal Kesehatan Masyarakat Nasional, Vol.7 No.4.
- Sumaryadi. *Perencanaan Pembangunan Daerah Otonom dan Pemberdayaan Masyarakat*, CV Citra Utama.
- Sutisna, Endang dkk., *Model Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan, studi Program Desa Siaga*, Artikel Peneliti.
- Tim Penyusun. 2020. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah IAIN Parepare*, Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press.
- Wawancara dengan Anti, Pasien/Warga Kelurahan Lompoe Kota Parepare, Wekke'e Pukul 17.09 WITA Hari Senin, Tanggal 2 Agustus 2021.
- Wawancara dengan Darmia selaku masyarakat Kelurahan Lompoe Kota Parepare tanggal 26 Agustus 2022.
- Wawancara dengan Isana selaku masyarakat Kelurahan Lompoe Kota Parepare tanggal 26 Agustus 2022

Wawancara dengan Ramli Podi, Ketua RW 003 Kelurahan Lompoe Kota Parepare,
Wekke'e Pukul 09.30 WITA, Hari Jumat, Tanggal 16 Juli 2021.

Wawancara dengan Rosdiana, Kepala Seksi Pelayanan Umum Dan Pemberdayaan
Masyarakat Kelurahan Lompoe Kota Parepare tanggal 26 Agustus 2022.

Widjajanti, Kesi. 2011. *Model Pemberdayaan Masyarakat, Jurnal Ekonomi
Pembangunan*, Vol.12 No.1.

Website:

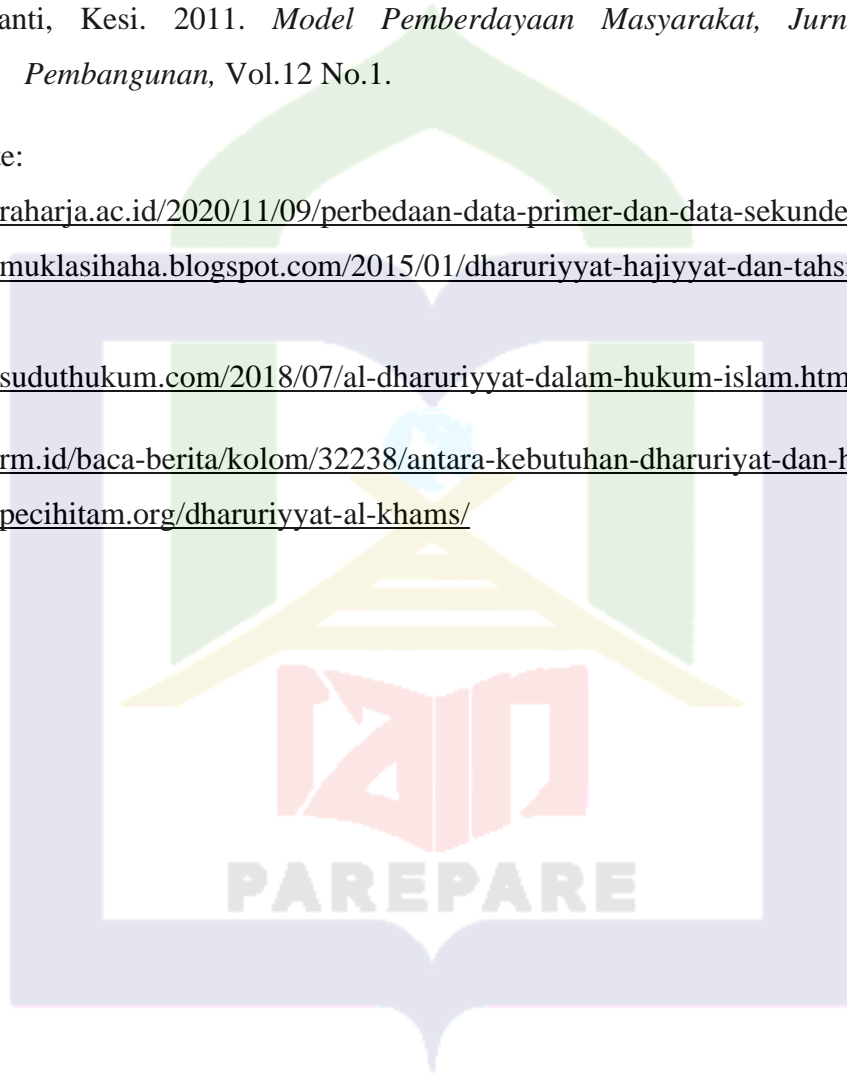
<https://raharja.ac.id/2020/11/09/perbedaan-data-primer-dan-data-sekunder/>

<https://muklasihaha.blogspot.com/2015/01/dharuriyyat-hajiyyat-dan-tahsiniyat-asy-.html>

<https://suduthukum.com/2018/07/al-dharuriyyat-dalam-hukum-islam.html>

<https://rm.id/baca-berita/kolom/32238/antara-kebutuhan-dharuriyat-dan-hijjiyah-2>

<https://pecihitam.org/dharuriyyat-al-khams/>





LAMPIRAN – LAMPIRAN

PAREPARE

Lampiran 1. Permohonan Izin Penelitian



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM

Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 91100, website: www.iainpare.ac.id, email: mail@iainpare.ac.id

Nomor : B.2036/In.39.6/PP.00.9/08/2022

Lamp. : -

Hal : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. WALIKOTA PAREPARE

Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Di

Tempat

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare:

Nama : ANDI HUSNUL AWALIYAH
Tempat/ Tgl. Lahir : Parepare, 2 Februari 2000
NIM : 18.2600.027
Fakultas/ Program Studi : Syariah dan Ilmu Hukum Islam/
Hukum Tata Negara (Siyasah)
Semester : VIII (Delapan)
Alamat : Jl. Lammide Wekke'e, Lompoe, Kec. Bacukiki, Kota.
Parepare

Bermaksud akan mengadakan penelitian di Wilayah Kota Parepare dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul:

"Peran Pemerintah Daerah Dalam Pemberdayaan Layanan Kesehatan Masyarakat di Kelurahan Lompoe Kota Parepare (Analisis Al-Dharuriyah Al-Khamsah)"

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan Agustus sampai selesai.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasama diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

Parepare, 05 Agustus 2022

Dekan,


Rahmawati

Lampiran 2. Rekomendasi Penelitian

		SRN IP0000643
PEMERINTAH KOTA PAREPARE DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU <i>Jalan Veteran Nomor 28 Telp (0421) 23594 Faximile (0421) 27719 Kode Pos 91111, Email : dpmpstp@pareparekota.go.id</i>		
REKOMENDASI PENELITIAN Nomor : 644/IP/DPM-PTSP/8/2022		
Dasar : <ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.3. Peraturan Walikota Parepare No. 23 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Wewenang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.		
Setelah memperhatikan hal tersebut, maka Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu :		
MENGIZINKAN		
KEPADA NAMA	: ANDI HUSNUL AWALIYAH	
UNIVERSITAS/ LEMBAGA	: INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)	
Jurusan	: HUKUM TATA NEGARA	
ALAMAT	: JL. LAMMIDE WEKKE'E, KEC. BACUKIKI, KOTA PAREPARE	
UNTUK	: melaksanakan Penelitian/wawancara dalam Kota Parepare dengan keterangan sebagai berikut :	
JUDUL PENELITIAN	: PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PEMBERDAYAAN LAYANAN KESEHATAN MASYARAKAT DI KELURAHAN LOMPOE KOTA PAREPARE (ANALISIS AL-DHARURIYAH AL-KHAMSAH)	
LOKASI PENELITIAN	: KECAMATAN BACUKIKI (KELURAHAN LOMPOE) KOTA PAREPARE	
LAMA PENELITIAN	: 15 Agustus 2022 s.d 15 September 2022	
a.	Rekomendasi Penelitian berlaku selama penelitian berlangsung	
b.	Rekomendasi ini dapat dicabut apabila terbukti melakukan pelanggaran sesuai ketentuan perundang - undangan	
Dikeluarkan di: Parepare Pada Tanggal : 16 Agustus 2022		
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA PAREPARE		
 Hj. ST. RAHMAH AMIR, ST, MM		
Pangkat : Pembina (IV/a) NIP : 19741013 200604 2 019		
Biaya : Rp. 0.00		

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1

- Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **Sertifikat Elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Dokumen ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di database DPMPSTP Kota Parepare (scan QRCode)



Balai Sertifikasi Elektronik



Lampiran 3. Pedoman Wawancara



NAMA MAHASISWA : ANDI HUSNUL AWALIYAH
NIM : 18.2600.027
FAKULTAS : SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
PRODI : HUKUM TATA NEGARA
JUDUL : PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM
PEMBERDAYAAN LAYANAN KESEHATAN
MASYARAKAT DI KELURAHAN LOMPÖE KOTA
PAREPARE (ANALISIS AL – DHARURIYAH AL –
KHAMSAH)

PEDOMAN WAWANCARA

Wawancara untuk Pemerintah Kelurahan Lompöe Kota Parepare

1. Apakah Pemerintah Kelurahan Lompöe telah memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat Kelurahan Lompöe?
2. Apakah pelayanan kesehatan masyarakat di Kelurahan Lompöe dilaksanakan dengan baik?
3. Apakah Pemerintah Kelurahan Lompöe mengetahui apa saja keluhan kesehatan masyarakat Kelurahan Lompöe?
4. Bagaimana Pemerintah Kelurahan Lompöe mengetahui keluhan-keluhan kesehatan yang dialami masyarakat Kelurahan Lompöe?
5. Pelayanan kesehatan apa saja yang disediakan oleh Pemerintah Kelurahan Lompöe?

6. Bagaimana cara Pemerintah Kelurahan Lompoe memenuhi fasilitas pelayanan kesehatan masyarakat Kelurahan Lompoe?
7. Apakah ada syarat yang harus dilakukan untuk mendapatkan pelayanan kesehatan?
8. Apakah Pemerintah Kelurahan Lompoe merasa bahwa syarat tersebut tidak menjadi masalah bagi masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan?
9. Bagaimana cara Pemerintah Kelurahan Lompoe memberikan informasi kepada masyarakat tentang adanya pelayanan kesehatan dari Kelurahan Lompoe?

Wawancara untuk masyarakat Kelurahan Lompoe Kota Parepare


1. Apakah bapak/ibu mendapatkan pelayanan kesehatan dari Pemerintah Kelurahan Lompoe?
2. Seperti apa pelayanan kesehatan yang bapak/ibu dapatkan dari Pemerintah Kelurahan Lompoe?
3. Apakah bapak/ibu merasa terbantu dengan pelayanan kesehatan yang ada?
4. Apakah ada syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk mendapatkan pelayanan kesehatan?
5. Apakah bapak/ibu merasa terbebani dengan adanya syarat tersebut?
6. Bagaimana bapak/ibu mendapatkan informasi terkait adanya pelayanan kesehatan dari Pemerintah Kelurahan Lompoe?


Parepare, 10 Maret 2022

Mengetahui,-

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping


Dr. Agus Muchsin, M.Ag
NIP: 197311242000031002


Dr. H. Syafaat Anugrah Pradana, S.H., M.H
NIP: 199305262019031008

Lampiran 4. Surat Telah Menyelesaikan Penelitian



PEMERINTAH KOTA PAREPARE
KECAMATAN BACUKIKI
KELURAHAN LOMPOE
Jl. Gelora Mandiri No. 01 Wekke'e
PAREPARE

Kode Pos 91125

SURAT KETERANGAN

NO : 148.3 / 675 / LPE

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **H. LA HUDDING, S.Sos**
Jabatan : LURAH LOMPOE
Nip : 19681113 199003 1 006

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa :

Nama : **ANDI HUSNUL AWWALIYAH**
NIK : 7372014202000005
Tempat/Tgl. Lahir : Parepare, 02 Februari 2000
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Pekerjaan : Belum Bekerja
Alamat : Jl. Lammide Wekke'e, RT.01/RW.03
Kel. Lompoe Kec. Bacukiki Kota Parepare.

Bahwa yang tersebut namanya di atas adalah benar telah melakukan penelitian pada Kantor Kelurahan Lompoe Kota Parepare guna penyusunan Skripsi mulai tanggal 15 Agustus s/d 15 September 2022 dengan judul " PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PEMBERDAYAAN LAYANAN KESEHATAN MASYARAKAT DI KELURAHAN LOMPOE KOTA PAREPARE (ANALISIS AL-DHARURIYAHAL-KHAMSIAH)

Demikian surat keterangan ini kami berikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 15 September 2022



Lampiran 5. Surat Keterangan Wawancara

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

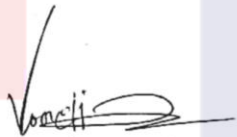
Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : ROSDIANA, S.E.
Tempat/Tanggal Lahir : PAREPARE, 20 FEBRUARI 1972
Agama : ISLAM
Pekerjaan : ASN
Selaku Pihak/Jabatan : KEPALA SEKSI PELAYANAN UMUM & PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
KEI. LOMPUE KEC. BALUPIKI KOTA PAREPARE

Menerangkan bahwa, benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara Andi Husnul Awaliyah yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan "Peran Pemerintah Daerah Dalam Pemberdayaan Layanan Kesehatan Masyarakat Di Kelurahan Lompoe Kota Parepare (Analisis Al-Dharuriyah Al-Khamsah)".

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 26 Agustus 2022


ROSDIANA, S.E.

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : ISANIA
Tempat/Tanggal Lahir : PAREPARE, 30 Desember 1966
Agama : ISLAM
Pekerjaan : IRT
Selaku Pihak/Jabatan : MASYARAKAT

Menerangkan bahwa, benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Andi Husnul Awaliyah yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan “Peran Pemerintah Daerah Dalam Pemberdayaan Layanan Kesehatan Masyarakat Di Kelurahan Lompoe Kota Parepare (Analisis Al-Dharuriyah Al-Khamsah)”.

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 26 Agustus 2022

Isania

ISANIA

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : DARMIA
Tempat/Tanggal Lahir : PAREPARE, 10 FEBRUARI 1984
Agama : ISLAM
Pekerjaan : IPT
Selaku Pihak/Jabatan : MASYARAKAT

Menerangkan bahwa, benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Andi Husnul Awaliyah yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan "Peran Pemerintah Daerah Dalam Pemberdayaan Layanan Kesehatan Masyarakat Di Kelurahan Lompoe Kota Parepare (Analisis Al-Dharuriyah Al-Khamsah)".

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 26 Agustus 2022



DARMIA

Lampiran 6. Dokumentasi







BIOGRAFI PENULIS



ANDI HUSNUL AWALIYAH Lahir pada 2 Februari 2000 di Kota Parepare, Bertempat tinggal di Kecamatan Bacukiki Kelurahan Lompoe Kota Parepare Provinsi Sulawesi Selatan. Penulis lahir dari pasangan ayah kandung bernama Selli Andi Ratte dan Ibu kandung bernama Zaenab. Anak pertama dari dua bersaudara yakni Andi Ilham. Pada tahun 2006 penulis mulai masuk Pendidikan formal Sekolah Dasar Negeri (SDN) 37 Parepare dan lulus di tahun 2012, Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 10 Parepare pada tahun 2012-2015. Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 2 Parepare di tahun 2015-2018. Kemudian pada tahun 2018 penulis melanjutkan program Strata Satu (S1) di Institut Agama Islam Negeri (IAIN)

Parepare, dengan memilih Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam, pada Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah). Pada semester akhir penulis melaksanakan Kuliah Pengabdian Masyarakat (KPM) pada tahun 2022 di Desa Pekalobean, Kec. Anggeraja, Kab. Enrekang dan melaksanakan Praktek Pengalaman Lapangan di Kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kota Parepare.

Dengan Ketekunan, Motivasi dan semangat serta dukungan dari keluarga dan temanteman, penulis telah berhasil menyelesaikan pengerjaan tugas akhir skripsi dengan judul “Peran Pemerintah Daerah dalam Pemberdayaan Layanan Kesehatan Masyarakat di Kelurahan Lompoe Kota Parepare (Analisis Al – Dharuriyah Al – Khamsah)”.